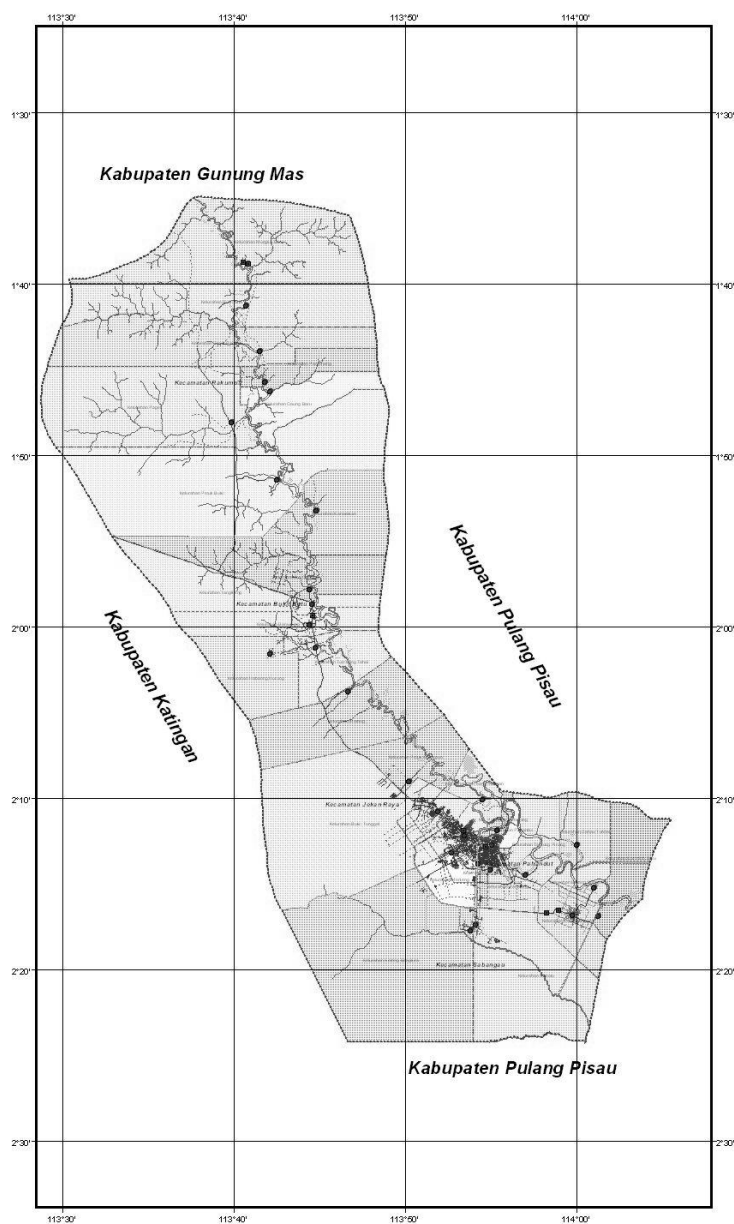




PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2008 – 2028



PALANGKA RAYA TAHUN 2009

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Pengertian	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Landasan	4
E. Tata Urut	5
 BAB II	
KONDISI UMUM DAN ANALISIS ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA	6
A. Kondisi Umum dan Analisis	6
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	6
1.1. Kondisi Umum Permasalahan dan Keberhasilan	6
1.1.1. Demografi	7
1.1.2. Pendidikan	8
1.1.3. Kesehatan	12
1.2. Analisis Isu Strategis	14
2. Pariwisata	15
2.1. Kondisi Umum Permasalahan dan Keberhasilan	15
2.2. Analisis Isu Strategis	18
3. Prasarana dan Sarana	23
3.1. Kondisi Umum Permasalahan dan Keberhasilan	23
3.2. Analisis Isu Strategis	29
4. Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Investasi	31
4.1. Kondisi Umum Permasalahan dan Keberhasilan	31
4.2. Analisis Isu Strategis	33
5. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	35
5.1. Kondisi Umum Permasalahan dan Keberhasilan	35
5.2. Analisis Isu Strategis	37
6. Sosial, Budaya dan Politik	46
6.1. Kondisi Umum Permasalahan dan Keberhasilan	41
6.2. Analisis Isu Strategis	42
7. Pemerintahan Kota	44
7.1. Kondisi Umum Permasalahan dan Keberhasilan	44
7.2. Analisis Isu Strategis	45
B. Prediksi Kondisi Umum Kota Palangka Raya	47
 BAB III	
VISI DAN MISI	57
3.1. Pengantar	57
3.2. Visi Pembangunan Kota Palangka Raya	57
3.3. Misi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028	59
 Bab IV	
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PRIORITAS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN	63
A. Arah Kebijakan dan Strategi	63
1. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berorientasi Global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumberdaya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil	63

2.	Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan	70
3.	Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang terencana, tertata dan berkualitas	71
4.	Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri.....	73
5.	Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi falsafah budaya betang.....	80
6.	Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) (aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)	84
B.	Prioritas dan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang 2008 – 2028	88

BAB V	KAIDAH PELAKSANAAN	150
--------------	---------------------------------	------------

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen Perencanaan Komprehensif dua puluh tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM untuk setiap jangka waktu lima tahunan oleh Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih bersama dengan DPRD.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan proses pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan terhadap perekonomian dan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kota Palangka Raya pun telah terjadi dan secara umum dapat dikatakan meningkat dari kondisi sebelumnya.

Walaupun kualitas hidup masyarakat Kota Palangka Raya telah lebih baik, namun masih banyak masalah-masalah pembangunan yang masih harus di respon secara cepat dan tepat, seperti penyediaan prasarana wilayah, untuk menembus wilayah yang masih terisolir, pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, pengelolaan bidang pertambangan, peningkatan kualitas program-program pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan lahan tidur/gambut, peningkatan rasa aman serta masalah-masalah pembangunan lainnya.

Perubahan dan perbaikan yang telah terjadi juga menimbulkan tantangan baru. Tantangan pembangunan ini bersumber dari masalah-masalah pembangunan yang belum terselesaikan, tuntutan baru akibat perubahan peluang dan ancaman yang bersumber dari faktor-faktor eksternal maupun dampak negatif dari aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat yang sebelumnya tidak terduga dan tidak diantisipasi.

Beberapa tantangan baru tersebut adalah : kebutuhan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu bagian dari strategi baru dalam percepatan pembangunan, peningkatan daya saing dan daya tahan dunia usaha, ancaman kerusakan lingkungan, kerawanan pangan, pembangunan modal sosial (*social capital*) sebagai sumberdaya pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan-pelayanan dasar yang disediakan oleh satuan kerja perangkat daerah seluruh Kota Palangka Raya pembangunan kesadaran hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perubahan pola penularan penyakit dan tantangan-tantangan pembangunan lainnya.

Permasalahan pembangunan yang masih tersisa serta tantangan baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan respon yang relevan dari semua pelaku pembangunan di seluruh wilayah Kota Palangka Raya. Koordinasi dan konsistensi program kegiatan antar pelaku harus ditingkatkan. Program dan kegiatan fasilitasi pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus saling menguatkan satu sama lain. Tumpang tindih dan bahkan kejadian program yang saling meniadakan program lainnya harus dikurangi sehingga seluruh sumberdaya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, konsistensi program dan kegiatan fasilitasi pembangunan harus pula diperhatikan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus konsisten secara vertikal, konsisten secara horizontal dan konsisten dengan isu strategis yang dihadapi dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Kota Palangka Raya. Selain itu, semangat dan motivasi semua pelaku harus pula ditingkatkan agar upaya-upaya penciptaan

dan peningkatan nilai tambah ekonomi tidak melambat, tetapi bergerak cepat sesuai peluang dan ancaman pembangunan yang muncul dari luar daerah Kota Palangka Raya.

Sinkronisasi kebijakan memerlukan kesamaan persepsi tentang masa depan yang akan dituju. Pemahaman bersama tentang masa depan ini akan menjadi pengarah dan pemberi inspirasi tiap tindakan dan pengendali tiap kepentingan para pelaku pembangunan di wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya. Dengan demikian diperlukan dokumen Perencanaan Jangka Panjang yang lebih konsisten secara vertikal dan horizontal, konsisten dengan permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh daerah di wilayah Kota Palangka Raya, serta konsisten dengan arahan perundang-undangan sebagai dasar untuk mewujudkan amanat pembukaan UUD 45 di wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya.

B. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 serta pembentukan daerah otonom Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2008 hingga tahun 2028

C. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP Kota Palangka Raya disusun dengan maksud sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dalam periode 20 tahun. Dokumen ini juga akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan RPJP Kota Palangka Raya disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi

seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Seluruh upaya dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

D. LANDASAN

Landasan idiil dari RPJP ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945, sedang landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 – 2028;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2005 tentang Visi dan Misi Kota Palangka Raya.

E. TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 – 2028 akan disusun dalam tata urutan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kondisi Umum dan Analisis Isu Strategis Pembangunan Kota Palangka Raya

Bab III : Visi dan Misi

Bab IV : Arah Kebijakan, Strategi, Prioritas Dan Tahapan Pembangunan

Bab V : Kaidah Pelaksanaan

BAB II

KONDISI UMUM DAN ANALISIS ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA

A. KONDISI UMUM DAN ANALISIS

1. SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

1.1. KONDISI UMUM PERMASALAHAN DAN KEBERHASILAN

- Pada tahun 2005, jumlah keluarga miskin di Kota Palangka Raya adalah 15.106 keluarga atau 33,27 % dan pada tahun 2008 jumlah keluarga miskin tercatat sebanyak 14.659 keluarga atau 30,20 % dari keluarga di Kota Palangka Raya. Penanggulangan kemiskinan akan tetap menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam jangka panjang.
- Tingkat kepadatan penduduk di Kota Palangka Raya pada tahun 2007 sebesar 70,23 jiwa per Km², dengan tingkat persebaran masih terpusat pada daerah perkotaan. Yaitu Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya dengan kepadatan masing-masing sebesar 559,25 jiwa per Km² dan 273,17 jiwa per Km². Sedangkan untuk Kecamatan Sabangau sebesar 20,86 jiwa per Km², Bukit Batu sebesar 19,42 jiwa per Km² dan Rakumpit sebesar 2,80 jiwa per Km²,
- Bahwa sebagian besar tenaga kerja berusaha di lapangan usaha jasa, sedangkan di sektor industri masih di bawah 10%.
- Laju pertumbuhan penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 sebesar 2,66 %, hal ini masih dipandang terkendali sehubungan dengan keberhasilan program keluarga berencana, terutama di kalangan PNS.

- Angka Harapan Hidup penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2005 – 2007 dianggap cukup tinggi, yakni mencapai 72,9 -73,07 tahun.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palangka Raya meningkat dari 77,0 pada tahun 2005 menjadi 77,47 pada tahun 2007. Dengan peningkatan tersebut menempatkan Kota Palangka Raya pada tahun 2007 berada pada peringkat 7 secara nasional.

1.1.1 DEMOGRAFI

- Prediksi penduduk dengan laju pertumbuhan yang digunakan BPS, pada tahun 2007 penduduk Kota Palangka Raya berjumlah 188.123 orang. Dengan memperhatikan laju pertumbuhan tersebut dan perkiraan kemajuan di masa depan maka pada tahun 2028 jumlah penduduk Kota Palangka Raya akan mencapai 406.566 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2007:	± 188.123 orang
Tahun 2010:	± 216.551 orang
Tahun 2015:	± 247.653 orang
Tahun 2020:	± 289.072 orang
Tahun 2025:	± 340.687 orang
Tahun 2028	± 406.566 orang
- Dengan meningkatnya usia harapan hidup (sehat), maka struktur penduduk akan semakin tua (aging population). Hal ini membawa konsekuensi pada perlunya peningkatan pembangunan fasilitas umum, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.
- Dalam periode RPJP ini, IPM kota Palangka Raya dapat ditingkatnya dan diupayakan tetap berada pada peringkat 10 besar.
- Pada akhir periode RPJP jumlah keluarga miskin berkurang menjadi di bawah 10 %, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2007:	< 22 %
Tahun 2010:	< 20 %
Tahun 2015:	< 18 %
Tahun 2020:	< 15 %
Tahun 2025:	< 13 %
Tahun 2028	< 10 %

1.1.2. PENDIDIKAN

KONDISI UMUM PERMASALAHAN DAN KEBERHASILAN

Dunia pendidikan di Kota Palangka Raya mengalami beberapa permasalahan yang antara lain adalah:

- Mutu pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah, masih kurang kompetitif.
- *Penyebaran guru yang belum merata*
- *Pada semua jenjang pendidikan, masih banyak guru yang belum layak mengajar*
- Kualitas pendidikan (persekolahan) belum merata dalam hal pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
- Sarana pendidikan berupa laboratorium, perpustakaan, bengkel, lapangan olah raga masih belum memadai baik ketersediaan maupun penggunaannya
- Penjurusan bidang studi belum mencerminkan aspirasi masyarakat yang dibuktikan dengan adanya sejumlah SMA yang hanya memiliki jurusan tertentu atau terbatas.
- Belum maksimalnya penempatan guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan.
- Fungsi dan peran supervisi belum optimal.
- Terbatasnya guru SLB yang memiliki kualifikasi khusus termasuk keberadaan sarana dan prasarana khusus.
- Kurangnya kesempatan dan dukungan bagi para guru untuk mengikuti penataran, pelatihan, magang dan lain-lain.

Capaian bidang pembangunan pendidikan selama ini, telah membawa potret dunia pendidikan di Kota Palangka Raya yang dapat digambarkan dalam kondisi sebagai berikut:

- Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sudah cukup memadai secara kuantitas, namun belum memadai bila ditinjau dari segi penyebaran, kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan
- Mutu pendidik dan tenaga kependidikan ditinjau dari jenjang pendidikan yang ditamatkan sudah memadai namun masih perlu peningkatan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang terus berubah. Mengacu kepada ketentuan tentang standar mutu pendidikan (PP 19 tahun 2005) maka jenjang pendidikan tenaga kependidikan pada semua level pendidikan harus ditingkatkan melalui suatu program khusus yang sedapat mungkin tidak membebani pendapatan
- Jumlah kelas sudah cukup memadai bahkan untuk tingkat SD ada sekolah yang mesti digabung akibat kekurangan peserta didik, namun demikian kualitas kelas dalam hubungannya dengan kenyamanan peserta didik masih perlu peningkatan
- Proporsi jumlah siswa yang lulus ujian terus meningkat baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah
- Pemerataan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan masih kurang untuk masing-masing sekolah sehingga ada sekolah yang dianggap sebagai sekolah Favorit oleh masyarakat untuk semua tingkat pendidikan, sehingga pada sekolah favorit dimaksud akan selalu kelebihan pendaftar, namun disekolah lainnya hanya mendapat sedikit sekali siswa baru setiap tahunnya
- Kota Palangka Raya berdasarkan hasil pendataan tahun 2007 mempunyai skore Indek Pembangunan Manusia

(IPM) yang cukup tinggi yaitu berada pada level 7 secara nasional dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Perlu upaya yang terus menerus untuk memberikan skor angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah untuk mempertahankan peringkat tersebut dari sektor pendidikan.

ANALISIS ISU STRATEGIS

1). Proyeksi Peluang

- Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kesempatan untuk terus memacu diri sebagai kota terkemuka dalam hal pendidikan untuk Kalimantan Tengah karena merupakan Kota dengan skor Indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi yang berada pada level 7 tingkat nasional pada tahun 2007.
- Dengan adanya tingkat IPM demikian maka Kota Palangka Raya menyimpan tingkat mutu modal manusia yang cukup tinggi dan sangat potensial untuk dikembangkan.
- Selama ini Palangka Raya masih dianggap yang terbaik dalam semua level pendidikan untuk itu Citra ini harus dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dunia pendidikan di Kalimantan Tengah umumnya dan Palangka Raya khususnya, baik untuk yang berorientasi bisnis maupun yang bersifat organisasi non-profit.

2). Proyeksi Ancaman

- Seiring dengan citra positif pembangunan SDM, Kota Palangkaraya juga melahirkan citra negatif pembangunan SDM sebagai dampak dari narkoba, minuman keras dan pergaulan yang kurang menunjang pengembangan budaya kependidikan.

- Kompetisi yang cukup ketat untuk menjaring siswa-siswa potensial terutama untuk jenjang pendidikan tinggi.
- Kelesuan ekonomi yang berimbas pada kemampuan orang tua untuk pembiayaan pendidikan anak-anaknya. Sementara itu kecenderungan yang terjadi adalah semakin tingginya tingkat biaya pendidikan dari tahun ketahun.

3). Proyeksi Permasalahan

- Modal manusia atau Human Capital untuk masa yang akan datang akan menjadi isu dan tujuan utama pembangunan. Kapasitas dan kompetensi SDM di sebuah komunitas akan menjadi salah satu faktor penting menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk itu semua perangkat untuk meningkatkan mutu SDM harus disinergikan dalam rangka mempertahankan peringkat IPM yang ada.
- Pendidikan sebagai salah satu aspek yang terkait dalam investasi dalam sumberdaya manusia atau human capital investment dalam jangka panjang akan menjadi salah satu titik fokus yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Palangka Raya. Pelayanan pendidikan yang baik akan menghasilkan output SDM yang berkualitas dan mempunyai kelebihan atau keunggulan bersaing atau competitive advantage yang berdaya bersaing tinggi.
- Semakin berkurangnya jumlah mahasiswa yang studi di Palangka Raya, sebagai konsekuensi keterbatasan pilihan pendidikan yang ada di Palangka Raya dan juga kompetisi untuk mendapat calon mahasiswa berkualitas.

- Keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) akan mengakibatkan berkurangnya jumlah murid sekolah terutama untuk tingkat dasar.

4). Proyeksi Keberhasilan

- Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal
- Meningkatnya kelulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga mendekati angka 100 persen
- Terlaksananya program wajib belajar 12 tahun sehingga pendidikan minimal masyarakat Kota Palangka Raya adalah setara SLTA
- Menurunnya tingkat buta aksara hingga mendekati angka nol persen
- Adanya fasilitas taman pendidikan pemuda dan olah raga, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), taman bacaan masyarakat, dan perpustakaan yang modern serta lengkap yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan

1.1.3. KESEHATAN

KONDISI UMUM PERMASALAHAN DAN KEBERHASILAN

Dalam rangka pembangunan bidang kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dan kewaspadaan masyarakat untuk menjaga kualitas air dan udara sehingga tetap berkualitas layak masih rendah. Kualitas udara akan sangat terganggu pada saat musim kemarau sebagai akibat adanya pembakaran dan kebakaran lahan yang berdampak pada mewabahnya penyakit ISPA.

- Kualitas sanitasi lingkungan yang bervariasi antara permukiman diperkotaan dan pedesaan dan antara lingkungan permukiman tertata dan terencana dengan baik dengan kawasan padat penduduk dengan keadaan relatif tidak tertata dan terencana dengan baik digambarkan dari prasarana pembuangan limbah.
- Jangkauan pelayanan kesehatan yang relatif masih terbatas terutama pada daerah perdesaan/luar pusat kota palangka raya.
- Kendala sosial ekonomi masih menjadi permasalahan bagi sebagian penduduk terutama diperdesaan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang lebih baik.
- Rasio tenaga kesehatan yang masih relatif kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luasnya wilayah yang memerlukan pelayanan kesehatan.

Keadaan pembangunan bidang Kesehatan di Kota Palangka Raya selama ini telah membawa masyarakat Kota Palangka Raya dalam kondisi yang bisa digambarkan sebagai berikut:

- Fasilitas dan tenaga kesehatan cukup memadai namun penyebarannya kurang merata dan terpusat pada pusat kota baik untuk fasilitas kesehatan maupun untuk tenaga kesehatan.
- Tenaga kesehatan yang masih dirasakan kurang adalah dokter spesialis.
- Akibat keadaan penyebaran tersebut jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan untuk daerah pedesaan yang berada jauh dari pusat kota menjadi kurang berimbang.
- Sosialisasi untuk hidup sehat dan bersih cukup berhasil untuk kalangan masyarakat tertentu, namun masih banyak kelompok masyarakat yang belum mampu untuk merubah budaya hidup yang kurang sehat.

ANALISIS ISU STRATEGIS

1). Proyeksi Peluang

- Program Indonesia sehat akan memotivasi jajaran kesehatan untuk lebih memacu diri melayani dan menjangkau lebih jauh semua masyarakat dalam lingkup Kota Palangka Raya seiring dengan semakin mudahnya akses kedaerah pedesaan.
- Masyarakat Kota Palangka Raya relatif mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai sehingga lebih mudah untuk diajak menjalankan pola hidup bersih dan sehat.
- Kesadaran akan pentingnya kesehatan dalam setiap individu akan memberikan peluang bagi masing-masing individu untuk memelihara kesehatan diri dan lingkungannya.

2). Proyeksi Ancaman

- Perubahan kualitas udara sebagai dampak kebakaran lahan disekitar kota dan juga cenderung semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor akan berdampak pada semakin beresikonya warga Kota Palangka Raya terhadap penyakit ISPA.
- Pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang diduga sebagian besar adalah warga yang bermigrasi ke Kota Palangka Raya akan cenderung menumbuhkan kawasan kumuh yang juga akan berdampak pada aspek kesehatan masyarakat.
- Perubahan rona lingkungan hidup sebagai dampak dari semakin menipisnya hutan, semakin banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi air tanah dan atau air permukaan terutama masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai.

3). Proyeksi Permasalahan

- Perubahan komposisi penduduk dalam hal pendidikan dan status sosial yang menghuni kota Palangka Raya akan bermasalah apabila ternyata penduduk generasi baru kota Palangka Raya adalah mereka yang berpendidikan rendah dan atau mempunyai status sosial ekonomi yang lemah.
- Tumbuhnya kawasan industri atau permukiman yang kurang memenuhi syarat-syarat kesehatan yang akan menyebabkan pencemaran air, udara maupun tanah.

4). Proyeksi Keberhasilan

- Pembangunan bidang kesehatan akan mampu memberikan dampak kepada semakin tingginya usia harapan hidup Warga Kota Palangka Raya yang akan memberikan kredit poin tersendiri bagi peningkatan kualitas pembangunan manusia seperti yang tergambar dari skore Indek Pembangunan Manusia (IPM)
- Jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat akan semakin baik dan semakin merata tidak saja pada daerah pusat Kota tetapi juga daerah pinggiran kota dan pedesaan.

2. PARIWISATA

2.1. KONDISI UMUM PERMASALAHAN DAN KEBERHASILAN

- Kesadaran masyarakat masih rendah sebagai tuan rumah maupun pelaku usaha.
- Sebagian besar lokasi / obyek wisata di bawah pengelolaan pihak lain / swasta.
- Sinergi antara pelaku pariwisata masih rendah dan kurangnya fasilitas pendukung di lokasi wisata.

- Belum ada tapal batas yang jelas dalam hal pembagian lahan untuk kepentingan obyek wisata, pertanian dan hunian sehingga menyebabkan adanya konflik hak guna lahan.
- Adanya pemukiman penduduk di tepi-tepi danau dan sungai yang mengurangi nilai keindahan dan kealamian alam.
- Pelayanan di ODTW kurang memadai antara lain fasilitas yang tidak terawat, perawatan obyek yang tidak memadai, kebersihan yang tidak terjaga, menu yang kurang higienis, papan penunjuk yang kurang jelas, fasilitas penginapan minim khususnya disepanjang aliran sungai, sarana air bersih tidak tersedia.
- Belum ada pendokumentasian keragaman kekayaan budaya lokal dalam bentuk visualisasi legenda atau cerita rakyat maupun situs-situs kebudayaan.

Capaian kunjungan wisata mancanegara di Kota Palangka Raya dapat digambarkan dalam kondisi sebagai berikut :

No.	Negara Asal	Jumlah			Jumlah Total
		Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	
1	2	3	4	5	6
1.	Polandia	1	1	1	3
2.	USA	2	7	15	24
3.	Denmark	1	1	1	3
4.	Jerman	8	3	7	18
5.	Australia	18	9	10	37
6.	Malaysia	20	-	27	47
7.	China	22	3	56	81
8.	Kanada	7	1	5	13
9.	Kolombia	2	-	-	2
10.	Filipina	3	-	3	6
11.	Pakistan	1	1	1	3

1	2	3	4	5	6
12.	Belgia	2	-	4	6
13.	New Zealand	1	-	1	2
14.	Korea Selatan	1	-	8	9
15.	Inggris	4	14	4	22
16.	Swiss	7	6	2	15
17.	Portugal	3	2	1	6
18.	Swedia	1	-	-	1
19.	Singapura	12	1	1	14
20.	Jepang	4	1	3	8
21.	Belanda	4	6	-	10
22.	Italia	-	2	-	2
23.	Irlandia	-	1	-	1
24.	Spanyol	-	1	-	1
25.	Eropa Barat	-	-	2	2
26.	Eropa Timur	-	-	2	2
27.	Thailand	-	-	33	33
28.	India	-	-	10	10
29.	Taiwan	-	-	4	4

Berdasarkan data tersebut jumlah kunjungan wisatawan terbanyak berasal dari Benua Asia dan Benua Eropa. Dengan demikian pasar kebudayaan dan Kepariwisata banyak diminati oleh wisatawan asal Asia dan Eropa.

Disamping wisatawan mancanegara Kota palangka Raya juga dikunjungi wisatawan – wisatawan nusantara yang terus bertambah, pada tahun 2008 jumlah wisata nusantara adalah sebanyak 91.000 orang.

2.2. ANALISIS ISU STRATEGIS

1). Proyeksi Peluang

- Potensi wisata di kota Palangate Raya yang paling besar adalah wisata alam, khususnya dengan keberadaan orang utan di pusat reintroduksi orang utan di Nyaru Menteng (dan sekitarnya) serta sering dipadukan dengan wisata susur sungai di sepanjang sungai Kahayan dan Rungan untuk melihat sisa sisa hutan tropis dan budaya lokal masyarakat dayak yang eksotis. Potensi yang lain adalah wisata rohani dengan keberadaan Yayasan Subud di kelurahan Sei Gohong dan Bukit Carmel di Kelurahan Banturung.
- Disamping itu juga dapat dikembangkan wisata sejarah karena Kota Palangka Raya adalah kota yang desainnya disusun oleh Presiden Soekarno, termasuk beberapa bangunan yang sekarang masih tersisa. Hal ini tentu menuntut pelestarian bangunan yang ada dan perwujudan wajah kota yang terencana dan tertata.
- Obyek – obyek wisata berbasis pada alam yang ada di Kota Palangka Raya adalah :Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, Danau Hantu, Arboretum Nyaru Menteng dan Pusat Reintroduksi Orang Utan, Danau Tahai, Taman Gaul, Taman Wisata Kum Kum, Rumah Makan Kampung Lauk, Taman Wisata Sabaru, Yos Sudarso Kuliner dan lain-lain.
- Telah dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berperan sebagai mediator antara penduduk setempat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan langkah-langkah pengembangan potensi wisata.
- Telah dilaksanakan pendokumentasian potensi wisata dan ditunjukkan kepada tim peneliti dari dalam dan luar negeri.

2). Proyeksi Ancaman

- Adanya praktek illegal logging dan illegal mining yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
- Belum ada tapal batas yang jelas dalam hal pembagian lahan untuk kepentingan obyek wisata, pertanian dan hunian sehingga menyebabkan adanya konflik hak guna lahan.
- Beberapa obyek wisata belum dimasukkan dalam rancangan pengembangan daerah (RTRW dan RTRK).
- Adanya konflik kepentingan dalam hal eksplorasi daya tarik wisata dengan usaha konservasi flora dan fauna.
- Pemerintah Kota Palangka Raya belum mempunyai tempat latihan dan pementasan yang representatif karena belum dilengkapi dengan adanya kursi penonton, tata lampu, dan tata suara.

3). Proyeksi Permasalahan

- Dalam pengembangan pariwisata sifat paling mendasar dari investasi pada industri pariwisata adalah "*High Investment, Not Quick Yield*" artinya investasi di bidang pariwisata membutuhkan investasi yang besar dengan tingkat pengembalian yang lama (jangka panjang). Kondisi ini sungguh tidak menarik bagi kebanyakan *stakeholders* kepariwisataan yang masih memiliki budaya "*Instant and Shortcut*" dimana mereka lebih menyukai melakukan investasi yang dapat segera memberikan keuntungan. Sehingga para investor tidak tertarik menanamkan modalnya dalam mengembangkan usaha pariwisata. Dalam konteks ini diperlukan integrasi usaha pariwisata (*tourism business integration*) yang merupakan sinergi pelaku kepariwisataan secara horisontal maupun vertikal dan memberikan keuntungan atau manfaat

bagi masing-masing pihak. Oleh karenanya diperlukan bentuk-bentuk insentif yang mampu merangsang timbulnya investasi di bidang kepariwisataan dengan menggunakan manajemen partisipatoris dengan melibatkan seluruh *stakeholders* baik masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan Provinsi, serta pemerintah pusat.

- Selanjutnya masalah keamanan global menjadi perhatian serius. Masalah keamanan sangat terkait dengan aksi terorisme yang pada faktanya telah menjadi salah satu ancaman serius pada saat ini. Masalah keamanan global ternyata telah menciptakan citra yang sangat kurang menguntungkan bagi industri pariwisata global, dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama telah terusik akibat aksi bom di destinasi maupun fasilitas pariwisata (hotel dan pesawat terbang) serta didorong dengan adanya pandangan bahwa saat ini tidak ada destinasi yang aman untuk berwisata. Apabila sentimen ini sudah masuk dalam benak wisatawan, maka hal ini akan menjadi permasalahan yang cukup serius bagi perkembangan pariwisata global di masa depan.

4). Proyeksi Keberhasilan

Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pariwisata mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi

sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*)

Pembangunan pariwisata akan mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat Kota Palangka Raya untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan.

Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*)

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahmatan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*)

Pembangunan kepariwisataan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Kota Palangka Raya untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan.

Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema *paid holidays*.

Peningkatan Ekonomi dan Industri

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.

pengembangan Teknologi

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kota Palangka Raya yang bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya.

3. PRASARANA DAN SARANA

3.1. KONDISI UMUM PERMASALAHAN DAN KEBERHASILAN

1) Perhubungan Darat

- Panjang jalan dengan kondisi permukaan rusak dan rusak berat masih cukup dominan dari total panjang jalan yang ada di wilayah Kota Palangka Raya. Demikian juga, jalan kelas I, II dan sebagian kelas III masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan panjang jalan pada kelas-kelas yang lebih rendah.
- Stabilitas tanah yang rendah (terutama tanah gambut), banyaknya rawa dan sungai merupakan salah satu masalah teknis yang menyebabkan rendahnya daya dukung tanah dan menimbulkan biaya yang cukup besar dalam pembangunan prasarana perhubungan darat.
- Luas wilayah Kota Palangka Raya relatif kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Namun hingga saat ini, akses perhubungan darat masih belum mampu menjangkau semua ibukota kecamatan, seperti ibukota Kecamatan Rakumpit, Mungku Baru, yang terletak di Sungai Rungan.
- Sebagian besar wilayah kecamatan telah dilalui jalan arteri primer dan jalan kolektor primer. Namun jalan-jalan yang menghubungkan kedua jalan tersebut dengan sebagian besar desa-desa terdekat masih belum dibangun. Jalan-jalan penghubung yang telah ada, sebagian besar kondisinya kurang baik dan bahkan rusak berat, termasuk jembatan.

- Perawatan dan pemeliharaan jalan darat dan jembatan yang telah dibangun masih sangat rendah dan kurang intensif. Kebanyakan perbaikan jalan dan jembatan dilakukan jika kondisi jalan dan jembatan sudah cukup parah (rusak berat).
- Rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk turut serta dalam pemeliharaan dan pengamanan prasarana jalan darat dan jembatan. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa kegiatan pemeliharaan dan pengamanan prasarana dan sarana transportasi semata-mata merupakan tanggungjawab pihak pemerintah.
- Lemahnya perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan prasarana transportasi serta lemahnya pengawasan peruntukan penggunaan jalan, menyebabkan kualitas hasil pekerjaan yang rendah sehingga fungsi dan manfaatnya tidak sesuai dengan umur-guna yang direncanakan.
- Sarana dan fasilitas yang ada pada sebagian besar terminal masih sangat terbatas sehingga mengganggu kenyamanan calon penumpang.
- Terminal regional dan terminal mini/perintis belum dimanfaatkan secara optimal karena lemahnya pengawasan terhadap terminal-terminal liar yang bermunculan secara berkelompok pada tempat-tempat umum tertentu yang strategis. Sangat perlu untuk dilakukan penertiban secara terpadu oleh instansi terkait demi keselamatan dan kenyamanan penumpang.
- Lemahnya pengawasan terhadap operasi angkutan liar (taksi gelap) pada jalur-jalur tertentu. Hal ini

menyebabkan terhambatnya iklim berusaha dalam bidang transportasi angkutan umum.

- Sarana rambu-rambu pengatur lalu-lintas masih sangat minim dan terbatas.

2) Transportasi Sungai

- Sebagian dermaga yang telah dibangun tidak dapat diakses langsung oleh kendaraan darat, khususnya roda empat sehingga mempersulit angkutan barang dan penumpang. Disamping itu, sebagian besar dermaga belum memiliki sarana dan fasilitas yang memadai guna menunjang kelancaran arus transportasi dan kenyamanan publik.
- Kesadaran sebagian warga masyarakat pengguna jalur transportasi sungai masih rendah terutama dalam penggunaan kelengkapan keamanan/keselamatan penumpang dalam keadaan darurat dan penerangan pada malam hari.

3) Transportasi Udara

- Masalah yang dihadapi adalah kebakaran lahan dan hutan yang menghambat bahkan melumpuhkan aktivitas transportasi udara.
- Beberapa tahun terakhir, sebagian besar penerbangan regional dan nasional hanya dilayani oleh satu maskapai penerbangan dengan tarif yang relatif kurang kompetitif. Akibatnya dan dengan perhitungan ekonomis, menyebabkan beberapa calon penumpang memilih alternatif melalui bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin baik untuk rute keberangkatan maupun kedatangan.

4) Prasarana Drainase Kota dan Pengairan

- Pemeliharaan prasarana drainase kota yang telah dibangun sangat minim, terutama untuk saluran

drainase sekunder, tersier, dan gorong-gorong sehingga kurang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya, apabila terjadi hujan lebat, beberapa ruas jalan kota dan daerah tertentu mengalami banjir dan atau genangan temporer.

- Kualitas prasarana drainase kota dan pengairan masih belum ditingkatkan terutama saluran drainase sekunder dan tersier yang sebagian besar masih merupakan saluran tanah (belum permanen).
- Perbaikan dan pengawasan terhadap saluran drainase kota sangat terbatas dan kurang intensif. Ada sebagian kecil warga masyarakat yang menutup/menimbun saluran drainase untuk kepentingan jembatan pribadi.

5) Komunikasi

- Kapasitas sentral dan satuan sambungan telepon (SST) masih sangat terbatas sehingga sangat sulit bagi para calon pelanggan untuk mendapatkan sambungan telepon dalam waktu relatif cepat.
- Beberapa wilayah kecamatan, terutama ibukota kecamatan masih belum memperoleh fasilitas telepon (ibukota Kecamatan Bukit Batu dan Rangkupit).

6) Listrik

- Jangkauan jaringan listrik masih terbatas dan belum menjangkau hingga ke pedesaan. Terdapat sekitar 9.701 rumah tangga yang belum dapat dilayani atau tidak terjangkau oleh pelayanan PLN Unit Bisnis Palangka Raya.
- Efisiensi distribusi tenaga listrik masih rendah terutama 3 tahun terakhir dimana terjadi susut/kehilangan daya cukup besar.
- Pada saat-saat tertentu listrik tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun produksi daya tetap konstan.

- Terbatasnya pemasangan penerangan lampu-lampu jalan dan di tempat-tempat umum. Disamping itu, lampu-lampu jalan dan tempat-tempat umum yang telah terpasang sebagian tidak berfungsi dan walaupun berfungsi tetapi tidak menyala secara teratur.
- Pelayanan kepada para pelanggan masih belum optimal dan sering kita dengar di media masa beberapa keluhan pelanggan terhadap pelayanan PLN terhadap konsumen yang mengecewakan.
- Keamanan jaringan listrik, terutama tiang listrik penyangga kabel bertegangan tinggi kurang kokoh sehingga mudah roboh dan dapat membahayakan keselamatan jiwa masyarakat.

7) Air Bersih

- Pelayanan jaringan air bersih sangat terbatas dan belum menjangkau semua wilayah Kota Palangka Raya.
- Debit penyaluran air bersih masih rendah, tidak merata dan sangat kurang bahkan tidak mengalir pada saat pemakaian puncak pada pagi dan sore hari.
- Kualitas air bersih yang disalurkan masih rendah, tidak menentu, dan kadang-kadang keruh, banyak endapan dan berbau.

8) Penataan Ruang Wilayah dan Kota

- Hingga saat ini masih belum dilakukan evaluasi periodik kesesuaian Perda No. 07 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya dengan program pembangunan yang telah dilaksanakan.
- Evaluasi terhadap realisasi pengembangan dan pembangunan kota yang begitu pesat dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Palangka Raya belum dilaksanakan sehingga belum diketahui

sejauhmana peranan, fungsi dan tujuan penerapan Perda No. 08 Tahun 2001 tentang RDTRK Palangka Raya.

- Penerapan Perda No. 08 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Palangka Raya masih belum konsisten, misalnya pengamanan dan penanaman jalur hijau kota, sempadan sungai, alokasi letak bangunan, penertiban tempat usaha (pasar kaget, tempat hiburan, kaki lima, penjual buah, bengkel motor/mobil, meubelair, peternakan dan lain-lain). Beberapa kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah yang berada dalam kawasan pemukiman telah menimbulkan kebisingan dan bau tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan setempat.
- Penjabaran lebih rinci dari RDTRK kedalam Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Palangka Raya masih belum disusun yang menyebabkan tidak adanya pedoman teknis penataan bangunan/lingkungan kota sesuai dengan Kepmenkimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 Tahun 2002. Sampai dengan tahun 2006 telah dilakukan untuk kawasan jalan RTA. Milono, Yos Sudarso dan Tjilik Riwut.
- Daerah terbuka dan jalur hijau di Kota Palangka Raya masih sangat terbatas.

Capaian yang telah berhasil direalisasikan selama ini dalam bidang sarana prasarana Kota Palangka Raya dapat digambarkan sebagai berikut:

- Telah mulai disediakan dan ditertibkannya kawasan terbuka taman kota dan ruang terbuka hijau yang tersebar pada sentra-sentra permukiman dan kegiatan perdagangan/pusat kota.

- Telah dimulainya penyediaan kawasan jalan yang khusus diperuntukan bagi pejalan kaki (pedestarian area) pada kawasan pusat perdagangan dan atau pusat kegiatan rekreasi atau olah raga.
- Aksesibilitas yang semakin baik terhadap jaringan listrik bagi setiap rumah tangga.
- Akses terhadap jaringan air bersih yang semakin luas dan telah diusahakan untuk menjangkau daerah pinggiran kota dan desa-desa.
- Mulai disediakan jaringan moda transportasi yang terintegrasi dan nyaman serta terjangkau oleh semua level sosial ekonomi.

3.2. ANALISIS ISU STRATEGIS

1) Proyeksi Peluang

- Sebagai pusat pemerintahan dan akan mengarah menjadi pusat kegiatan perdagangan di Kalimantan Tengah (Kalteng) seiring dengan berhasilnya pembangunan jaringan jalan ke semua Kabupaten, Kota Palangka Raya mempunyai kebutuhan infrastruktur di bidang perdagangan dan jasa karena Kota Palangkaraya merupakan pusat aktifitas sosial ekonomi masyarakat di propinsi Kalteng.
- Dengan tersedianya lahan di wilayah Kota Palangka Raya maka peluang untuk pengembangan bangunan yang menyebar diseluruh kota menjadi sangat terbuka dan ini menimbulkan kebutuhan untuk pengembangan jaringan koneksitas untuk seluruh kota.
- Banyaknya pengguna kendaraan sepeda motor sebagai alat transportasi
- dengan proporsi yang sangat tinggi, maka penyediaan sarana transportasi massal yang nyaman menjadi

kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk direalisasikan.

2) Proyeksi Ancaman

- Banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal dalam jangka panjang menimbulkan dampak terjadinya permukiman yang padat, jika hal ini tidak ditata dengan baik maka mengakibatkan permukiman kumuh.
- Semakin banyaknya pengguna kendaraan sedangkan di sisi lain panjang jalan di Kota Palangka Raya juga meningkat namun demikian, jika sistem transportasi tidak ditata dengan baik maka akan terjadi kesemrawutan lalu lintas.
- Jika kontinuitas pelayanan air bersih dari PDAM tidak dijaga maka masyarakat akan cenderung menggunakan air tanah yang bisa mengancam kesehatan.
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah Kota Palangka Raya yang kelihatannya kurang memadai akan memerlukan fasilitas pengolahan yang baik tidak lagi cuma dibakar.

3) Proyeksi Permasalahan

- Sulitnya relokasi penataan kawasan kumuh terutama di kawasan bantaran sungai.
- Kurang layaknya sarana transportasi massal sehingga menyebabkan tingginya penggunaan mobil dan sepeda motor, hal ini menimbulkan potensi kemacetan dan polusi udara.
- Masalah perencanaan tata ruang perkotaan yang disebabkan oleh keterbatasan dana dan lemahnya koordinasi berbagai pihak yang terkait.

4). Proyeksi Keberhasilan

- Jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antar-moda berbasis pada efisiensi, efektif dan berkeadilan.
- Terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan bagi rumah tangga dan dunia usaha.
- Tersedianya prasarana dan sarana publik yang handal di sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan, dan energi.
- Semakin meratanya tingkat aksesibilitas sarana dan prasarana publik berdasarkan asas keadilan
- Tercukupinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

4. PEREKONOMIAN, SUMBERDAYA ALAM DAN INVESTASI

4.1. KONDISI UMUM PERMASALAHAN DAN KEBERHASILAN

- Laju pertumbuhan ekonomi (adhk tahun 2000) tahun 2003 sebesar 3,17% dan tahun 2004 mencapai 5,33%. Pada tahun 2007 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,69 %. Penurunan sumbangan lapangan usaha pertanian dalam PDRB belum dapat diimbangi oleh kenaikan sumbangan lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini didukung pula oleh data bahwa jumlah unit usaha industri kecil yang beroperasi di Kota Palangka Raya semakin menurun/berkurang.
- Pertumbuhan PDRB Perkapita tahun 2007 dibandingkan tahun 2006 atas dasar harga konstan turun sebesar – 0,65 %. Hal ini disebabkan lajunya tingkat pertumbuhan

pendudukan Kota Palangka Raya pada tahun 2007 yaitu sebesar 2,91 % .

- ICOR dipandang masih terlalu tinggi. Untuk meningkatkan PDRB dengan 1 unit dibutuhkan investasi sebesar 9,6 unit.
- ILOR menunjukkan bahwa untuk menciptakan tambahan tenaga kerja sebesar 1 orang, memerlukan tambahan PDRB sebesar Rp. 7,55 juta.
- Elastisitas PDRB dengan kapital dan tenaga kerja, ternyata in-elastis. yang berarti persentase kenaikan dalam investasi maupun tenaga kerja (input) diikuti oleh persentase kenaikan PDRB (output) yang lebih kecil.
- Produksi ikan yang berasal dari sungai, danau dan rawa semakin menurun. Penurunan ini tidak mampu diimbangi oleh kenaikan produksi dari usaha budidaya perikanan.
- Sumber daya tambang masih cukup besar namun untuk dapat mengeksplorasinya diperlukan investasi yang cukup besar.
- Inflasi di Kota Palangka Raya mempunyai hubungan dan dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Banjarmasin.

Dalam bidang ekonomi, capaian/ keberhasilan ditunjukkan antara oleh:

- Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun 2007 sebesar 4,25% sudah terlampaui, yaitu 5,12%.
- Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan dalam PDRB yang ditarget sebesar 9,0 % pada tahun 2007, juga terlampaui, yaitu 9,86 %.
- Tingkat inflasi masih tetap berada di bawah 10%.
- ICOR sejak tahun 2001 s/d 2004 cenderung menurun, dan target yang ditetapkan dalam RENSTRA untuk tahun 2007 sebesar 7, sudah dapat dicapai sebesar 6,5
- Jumlah unit dan kinerja serta penyerapan tenaga kerja pada usaha perdagangan dan koperasi meningkat.

4.2. ANALISIS ISU STRATEGIS

1). Proyeksi Peluang

- Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis bagi pembangunan daerah, termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Dalam hubungan ini Kota Palangka Raya dapat menjadi pemacu pertumbuhan perekonomian Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan. Dengan memperhatikan trend laju pertumbuhan PDRB dalam periode 1993 – 2006 dengan asumsi-asumsi tertentu, maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya dalam periode 2008-2028 RPJP diproyeksikan sekitar 5,5 % – 7,5 %.
- Iklim investasi masih dapat ditingkat, karena memiliki beberapa potensi sumberdaya alam, seperti danau, rawa, lahan dan potensi pertambangan.
- Dengan prasarana ekonomi dan sosial yang relatif lebih baik dan tekad pemerintah untuk menarik investor maka ICOR akan menurun lagi.
- Pemberdayaan usaha UMKM dan Koperasi sehingga mampu menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Dengan demikian ILOR bisa ditekan sehingga besaran PDRB yang diperlukan untuk menciptakan kesempatan kerja baru menjadi lebih kecil.
- Terkendalinya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam.

2). Proyeksi Ancaman

- Kota Palangka Raya masih belum memiliki komoditas atau produk unggulan yang dapat dipasarkan secara nasional dan global.

- Industri sebagian besar dalam skala kecil dan jumlahnya cenderung berkurang. Keadaan ini menunjukkan bahwa penciptaan kesempatan berusaha sektor industri cukup sulit berkembang.
- Dengan semakin terbukanya ekonomi Kota Palangka Raya, selain merupakan peluang berusaha juga dapat menjadi ancaman bagi unit-unit usaha yang sudah ada apabila tidak memiliki daya tahan, daya saing dan daya tarik.
- Karena cukup luasnya wilayah hutan dan semak belukar, ancaman kebakaran hutan dapat terjadi terutama di musim kemarau dan pada beberapa kelurahan terjadi banjir di musim hujan.
- Produksi perikanan yang semakin menurun sebagai dampak dari kerusakan lingkungan dan penangkapan ikan yang berlebihan.
- Bahwa tingkat inflasi di Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi di Banjarmasin. Terdapat kecenderungan inflasi di Palangka Raya lebih tinggi daripada di Banjarmasin.

3). Proyeksi Permasalahan

- Lapangan usaha di Kota Palangka Raya masih didominasi oleh sektor usaha jasa, dan sebagian penduduknya adalah PNS. Kelompok ini umumnya berpenghasilan tetap.
- Unit-unit usaha masih sebagian besar adalah dalam skala kecil dan mikro sehingga masih menghadapi kendala-kendala teknis.
- Bahwa ada kecenderungan pengurasan sumber daya alam, seperti perikanan dan pertambangan.
- Dengan masih berlangsungnya penambangan emas rakyat di DAS Kahayan, kualitas air menjadi tercemar

dan pencemaran ini akan mempengaruhi aktivitas perekonomian Kota Palangka Raya.

4). Proyeksi Keberhasilan

- Laju pertumbuhan ekonomi dalam periode RPJP selalu meningkat.
- Meningkatnya sumbangan lapangan usaha industri pengolahan dalam PDRB.
- Unit usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi semakin berperan dalam perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.
- Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam.
- Berkurangnya pencemaran sungai Kahayan.
- Meningkatnya investasi.

5. GEOMORFOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

5.1. KONDISI UMUM PERMASALAHAN DAN KEBERHASILAN

Keadaan geomorfologi dan lingkungan hidup di Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor lingkungan alami dan juga faktor lingkungan non-alami. Faktor lingkungan alami adalah suatu keadaan dimana manusia tidak mampu untuk dapat mengendalikannya sedangkan faktor lingkungan non-alami adalah faktor-faktor yang timbul sebagai akibat dari tindakan manusia dan pada tingkat tertentu masih dapat dikendalikan. Berpijak pada keadaan demikian, permasalahan yang dialami oleh Kota Palangka Raya adalah:

- Akibat dari faktor alami yaitu letak Kota Palangka Raya yang berada pada dataran rendah sungai Kahayan, Rungan dan Sungai Sabangau, dengan komposisi tanah bergambut tipis dengan lapisan bawah berpasir dan untuk daerah pinggir sungai berjenis tanah aluvial yang umumnya rendah, adalah kawasan rawan banjir.

- Akibat budaya sungai dimana semenjak dahulu kala masyarakat Kalimantan Tengah bermukim disepanjang bantaran sungai, maka permukiman penduduk banyak yang berada pada pinggir sungai padahal kawasan tersebut adalah kawasan rawan banjir dan cenderung untuk berkembang menjadi kawasan kumuh.
- Disiplin penggunaan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Palangka Raya masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga potensial untuk menimbulkan konflik penggunaan ruang terutama pada kawasan strategis bagi kegiatan perekonomian dan atau pada kawasan yang sedang berkembang.
- Sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, sarana dan prasarana sanitasi lingkungan masih kurang, jangkauan pelayanan air bersih yang masih terbatas dan saluran drainase yang kurang berfungsi optimal sebagai akibat kurangnya kesadaran akan pengelolaan sampah dan air limbah rumah tangga.
- Pengembangan dan penyediaan kawasan hijau terbuka dirasakan kurang memadai, sementara itu diluar pusat kota, konversi lahan berhutan untuk penggunaan lainnya terus berlangsung atau dibiarkan menjadi lahan tidur akan beresiko menjadi kawasan rentan terbakar pada musim kemarau.
- Penambangan pasir dan batu belah pada kawasan diluar pusat kota tidak dibarengi dengan upaya reklamasi.
- Penggunaan air tanah oleh sebagian besar rumah tangga sebagai sumber air bersih berpotensi untuk menurunkan kuantitas dan kualitas sumber air tanah.
- Masih rendahnya kesadaran pemanfaatan lahan untuk tujuan produktif, sehingga banyak lahan terlantar dan tidak

terpelihara dengan baik, sehingga sangat rawan terbakar pada musim kemarau.

Keberhasilan dalam pengendalian dampak alami dari keadaan morfologi dan lingkungan hidup Kota Palangka Raya ditandai dengan adanya:

- Tersedianya kawasan terbuka hijau yang semakin mengarah kekeadaan yang lebih baik dibandingkan dengan luasan permukiman dan penggunaan lainnya.
- Relatif terkendalinya konversi kawasan hutan menjadi kawasan yang benar-benar bertujuan produktif dan mulai dimanfaatkannya lahan tidur menjadi lahan yang produktif.
- Sudah mulai terwujudnya pengembangan permukiman dan penggunaan lainnya yang relatif sesuai dengan rencana penggunaan ruang seperti yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- Terkendali dan tertatanya pengembangan permukiman dan pusat-pusat kegiatan ekonomi sehingga tidak menimbulkan kekumuhan dan ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang.
- Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan yang cukup memadai disertai dengan jangkauan pelayanan air bersih yang semakin luas dengan berkurangnya proporsi rumah tangga yang air bersihnya bersumber dari air tanah.

5.2. ANALISIS ISU STRATEGIS

1). Proyeksi Peluang

Kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup Kota Palangka Raya mempunyai peluang yang baik untuk ditata dan direncanakan dengan baik karena beberapa faktor sebagai berikut:

- Kota Palangka Raya adalah sebuah Kota yang unik karena mempunyai wilayah yang tidak hanya terdiri

dari kawasan perkampungan seperti umumnya wilayah kota, tetapi juga mempunyai kawasan hutan dan desa yang berada disepanjang sungai Rungan, Kahayan dan Sabangau, sehingga memberi opsi yang luas dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup.

- Tanah yang relatif landai dengan dikelilingi oleh sungai dan hutan yang masih luas sehingga fungsi ekologis lingkungan alami masih mampu untuk memberikan keseimbangan bagi lingkungan hidup di Kota Palangka Raya
- Kota Palangka Raya adalah sebuah kota yang berkembang dan direncanakan pembangunannya setelah Indonesia merdeka sehingga tidak terbentur dengan perkampungan yang telah ada sebelumnya sehingga Rencana Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota dapat diandalkan untuk mengatur bagaimana rona lingkungan hidup di Kota Palangka Raya, khususnya di Pusat Kota.
- Pengembangan dan perencanaan badan jalan ke wilayah-wilayah pengembangan akan membuat perkembangan permukiman berkembang dan tertata dengan baik sesuai dengan rencana yang ada.
- Pengelolaan sanitasi lingkungan terus diupayakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2). Proyeksi Peluang

- Kerusakan lingkungan alami yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem terutama dengan semakin menipisnya hutan, penipisan lapisan gambut dan terciptanya kawasan dengan lahan kritis dan terbengkalai serta penambangan pasir dan batubelah tanpa reklamasi akan dapat menjadi sumber masalah lingkungan hidup seperti, polusi udara, tanah dan air

yang secara alami akan menurunkan, daya dukung lingkungan.

- Bencana alam banjir dan kabakaran lahan dengan asap kabut tebal dapat menjadi ancaman yang serius dalam tahun-tahun mendatang apabila penanganan penggunaan lahan dibiarkan menjadi tanggungjawab para pemilik lahan.
- Antisipasi bencana banjir kiriman dan juga banjir akibat tidak memadainya drainase perlu dipertimbangkan dengan baik dalam pengembangan permukiman di pusat kota.
- Penangan masalah sampah harus diseriusi dengan memberikan pemahaman yang lebih giat kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

3). Proyeksi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Palangka raya dalam hubungannya dengan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup masih belum mempertimbangkan secara baik prinsip kelestarian dan kehati-hatian yang bisa saja akan mengganggu keseimbangan ekosistem.
- Belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.
- Masih akan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat penurunan kualitas lingkungan baik yang terjadi karena peralihan fungsi hutan, sungai dan danau dan juga akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah.
- Semakin besarnya keinginan untuk membuka kawasan hutan akan menyebabkan semakin menipisnya kawasan hutan yang mengelilingi Kota Palangka Raya

tanpa diimbangi dengan meningkatnya ruang terbuka hijau dan hutan kota akan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan yang dapat berdampak pada tidak terkendalinya polusi udara, air dan tanah.

- Belum terbentuknya secara luas motivasi dan kesadaran untuk memanfaatkan lahan tidur untuk tujuan produktif.

4). Proyeksi Keberhasilan

- Kota Palangka Raya mempunyai peluang yang cukup baik untuk menjadi kota yang bersih dan tertata dengan baik karena Kota Palangka Raya adalah sebuah kota yang dibangun dan dikembangkan pada daerah yang sebagian besar belum berpenghuni sehingga dapat diatur dan direncanakan dengan baik pola pemanfaatan ruang yang ada. Ketaatan terhadap rencana baik itu RTRW maupun RDTR akan menjadi kunci keberhasilan membangun Kota Palangka Raya yang benar benar CANTIK pada kurun waktu dua puluh tahun mendatang.
- Kota Palangka Raya dihuni oleh penduduk yang rata-rata mempunyai pendidikan yang baik, sehingga relatif mudah untuk diajak taat pada ketentuan yang ada, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup terutama sanitasi lingkungan.
- Dengan dikelilingi oleh sungai dan hutan, Kota Palangka Raya mempunyai kesempatan yang luas untuk menjadi kota yang hijau walaupun dengan kondisi tanah yang bergambut dan berpasir.

6. SOSIAL, BUDAYA DAN POLITIK

6.1. KONDISI UMUM PERMASALAHAN DAN KEBERHASILAN

- Tantangan yang sangat besar di bidang sosial budaya terutama dalam rangka menyelamatkan generasi muda dari berbagai godaan seperti bahaya narkoba, prostitusi dan pengaruh negatif budaya asing serta degradasi nilai-nilai kerohanian lainnya.
- Fungsi Lembaga adat seperti Damang masih belum dioptimalkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya luhur dan menjadi barometer untuk pengembangan lembaga adat untuk Kalimantan Tengah
- Belum membudayanya nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum juga merupakan salah satu sebab lemahnya kesadaran hukum masyarakat. keadaan ini secara tidak langsung menjadi pemicu timbulnya konflik antar suku bangsa. Disamping itu belum optimalnya sistem jaringan dan dokumen serta informasi hukum di lingkungan pemerintahan maupun di lembaga peradilan juga merupakan kendala dalam mendukung penyebaran informasi yang cepat, tepat, akurat dan transparan.

Sejauh ini Pemerintah dan Instansi terkait dengan didukung oleh tokoh masyarakat telah berhasil memberikan kondisi sosial budaya di Kota Palangka Raya yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama secara bertahap telah mampu meredam dampak konflik etnik tahun 2001.
- Tidak pernah muncul kepermukaan konflik vertikal dan horizontal yang bernuasa SARA sejak tahun 2002.
- Terbinanya kerukunan antar dan inter umat beragama, antar suku dan antara agama/suku dengan pemerintah.

- Situasi politik di Kota Palangka Raya yang cukup kondusif, partai politik dan ormas cukup tanggap dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan kontituentnya.

6.2. ANALISIS ISU STRATEGIS

1). Proyeksi Peluang

- Dalam kehidupan bermasyarakat mengedepankan hak-hak individu dan tetap terpeliharanya toleransi antar umat beragama, hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan yang paling penting adalah hubungan yang baik interen pemeluk agama.
- Diharapkan nantinya terbentuk budaya demokratis dan gotong royong yang akan mendorong terciptanya tata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan budaya luhur Dayak Ngaju yang merupakan implementasi Budaya Betang.

2). Proyeksi Ancaman

- Pengaruh arus informasi dan globalisasi yang dapat meruntuhkan sendri-sendri kehidupan masyarakat terutama generasi muda.
- Penyakit masyarakat seperti narkoba, prostitusi, perjudian harus ditindak tegas.
- Politisasi terhadap agama penting untuk dihindari guna menjaga kerukunan internal dan eksternal umat beragama.

3). Proyeksi Permasalahan

Permasalahan di bidang sosial, budaya dan politik, antara-lain:

- Peredaran dan jaringan narkoba dan Napza yang masih sulit diberantas.
- Degradasi nilai-nilai budaya daerah berhadapan dengan arus globalisasi.

- Penegakan dan kesadaran hukum akan menjadi masalah yang dapat mengganggu rasa keadilan masyarakat.
- Eklusivisme yang berlebihan pada golongan/agama dapat memicu konflik dan kontra produktif bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan.
- Lunturnya nilai-nilai budaya betang dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak terkait.

4). Proyeksi Keberhasilan

- Ke depan harus ada gerakan khusus yang diprakarsai oleh masyarakat guna menyelamatkan dan mencegah generasi muda dari berbagai godaan seperti bahaya narkoba, pengaruh negatif budaya asing dan degradasi nilai-nilai kerohanian lainnya.
- pembangunan dibidang agama harus mengedepankan hak-hak individu dan tetap terpeliharanya toleransi antar umat beragama, hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan yang paling penting adalah hubungan yang baik interen pemeluk agama.
- Dalam menjaga kerukunan internal dan eksternal umat beragama tidak terjadi politisasi terhadap agama.
- Semakin mantapnya penegakan Hukum dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat. .
- Diharapkan nantinya terbentuk budaya demokratis dan gotong royong yang akan mendorong terciptanya pemerintahan yang sesuai dengan budaya luhur Dayak Ngaju yang merupakan implementasi Budaya Betang.
- Semakin meningkatnya kualitas pesta demokrasi baik PEMILU tingkat nasional, Provinsi dan Kota.

7. PEMERINTAHAN KOTA

7.1. KONDISI UMUM PERMASALAHAN DAN KEBERHASILAN

- Pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota masih belum optimal. Belum semua instansi pemerintah memiliki dan menerapkan standar pelayanan minimal dan SOP (standard operating procedure).
- Seperti halnya kota-kota besar lainnya, permasalahan penduduk, pertanahan, bangunan dan ketertiban selalu muncul. Karena itu selain diperlukan peraturan perundangan yang jelas, dibutuhkan pula aparatur pemerintah yang tanggap dan profesional.
- Bahwa sebagian besar aparatur hanya berpendidikan SMU/ sederajat.
- Persentase PAD dalam APBD masih di bawah 10%,
- Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan.
- Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
- Indeks Pembangunan Manusia di Kota Palangka Raya tahun 2007 meningkat dibandingkan tahun 2004 dan secara nasional pada tahun 2004 berada pada peringkat ke 4 dan tahun 2007 peringkat ke 7. Keberhasilan ini tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
- Bahwa pertumbuhan PAD tahun 2007 sebesar 41 % jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RENSTRA sebesar 35 %.

7.2. ANALISIS ISU STRATEGIS

1). Proyeksi Peluang

- Dengan ditetapkannya Kota Palangka Raya sebagai salah-satu Kabupaten/ Kota penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diharapkan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam perumusan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan semakin meningkat.
- Adanya indikasi pemulihan ekonomi dan ICOR yang cenderung berkurang maka di masa mendatang investasi dari pihak swasta lebih berkembang dan seiring juga dengan tekad pemerintah Kota untuk menerapkan kebijakan satu atap (dan satu ruang) dalam hal perizinan.
- PAD dapat ditingkatkan selain karena adanya indikasi pemulihan ekonomi (hubungan PAD dengan PDRB yang elastis), juga melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
- Telah tersedia web-site Kota Palangka Raya untuk dapat menampung dan memperluas serta mempercepat arus informasi.

2). Proyeksi Ancaman

- Kesiapan SDM Pemerintah Kota dalam menghadapi era globalisasi, serta kemajuan teknologi serta informasi.
- Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pembangunan, maka kebijakan pemerintah Kota harus lebih transparan, akuntabel dan efektif dalam mengikuti perkembangan perubahan.
- Kalau Kota Palangka Raya gagal dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka sebagai Kota percontohan kredibilitas pemerintah

Kota akan menurun di mata pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

3). Proyeksi Permasalahan

- Penataan kelembagaan pemerintah Kota Palangka Raya belum secara optimal menjalankan kewenangan, urusan dan fungsi yang diamanatkan Undang-undang.
- Profesionalisme, kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur birokrasi yang belum optimal.
- Pelayanan administrasi umum pemerintah merupakan salah-satu aspek penting dalam menegakkan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, lebih-lebih dengan ditetapkan Kota Palangka Raya sebagai salah-satu daerah percontohan.
- Meskipun PAD secara umum meningkat, namun persentasenya terhadap total penerimaan masih di bawah 10%.

4). Proyeksi Keberhasilan

- Terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN.
- Aparatur pemerintah yang profesional, bertanggung jawab dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- Meningkatnya sumbangan PAD dalam total penerimaan APBD dan tercapai/terlampauinya target yang ditetapkan dalam RPJM.
- Pemerintah Kota mampu menunjukkan kinerja yang sesuai dengan harapan ditetapkannya sebagai salah-satu daerah percontohan penerapan good governance.

B. PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA PALANGKA RAYA

Secara umum kondisi dua puluh tahun ke depan yang diharapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 - Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam rangka pelayanan prima
 - Pemetaan potensi dan kompetensi manajerial pada staf di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
 - Pendidikan dan pelatihan staf sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah
 - Menggali sumber keuangan daerah melalui pajak dan retribusi dengan jalan intensifikasi maupun diversifikasi
 - Meningkatkan pengendalian penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.
 - Menerapkan sistem dan pola manajemen terbuka dalam pelayanan.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Tersedianya data lengkap, akurat dan mudah di akses
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.
 - Memperkuat iklim investasi dan realisasi investasi.
 - Terbentuknya Dewan Riset Kota Palangka Raya serta Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
 - Pembangunan mengacu Rencana Tata Ruang Daerah
4. Inspektorat
 - Terwujudnya tertib administrasi di Kota Palangka Raya
 - Terwujudnya Pemerintah Kota Palangka Raya yang bersih dan berwibawa serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
5. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 - Terwujudnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

- Pembinaan Organisasi politik dan organisasi massa agar lebih tanggap dalam menjaring dan menyaring aspirasi masyarakat.
 - Meningkatnya fungsi kelembagaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
 - Terwujudnya stabilitas sosial dan politik di seluruh wilayah Kota Palangka Raya.
 - Meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air
6. Sekretariat DPRD
- Tercapainya kualitas pelayanan tertib administrasi dan keuangan.
 - Tercapainya kualitas pengembangan sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya.
 - Tercapainya sarana dan prasarana dan dukungan administrasi dan tenaga professional.
7. Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- Penguasaan teknologi pertanian, perikanan dan peternakan.
 - Menjaga ketersediaan pangan dan ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah.
 - Pengelolaan sumberdaya pertanian yang lestari.
8. Kehutanan dan Perkebunan
- Melestarikan hutan sebagai sumberdaya alam.
 - Menyediakan hutan sebagai objek penelitian, pendidikan dan hutan kemasyarakatan.
 - Terwujudnya perkebunan rakyat yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat
 - Terwujudnya perkebunan besar swasta dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.
9. Pertambangan dan Energi
- Jaringan listrik dan daya listrik dapat menjangkau seluruh kebutuhan serta memenuhi Kota Palangka Raya.
 - Pengelolaan potensi pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Mengembangkan energi alternatif pengganti bahan bakar minyak.

- Pembinaan dan pengawasan pertambangan di sekitar kawasan pariwisata.
- Mengembangkan sistem pengelolaan pertambangan yang matang yang disertai penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, pengakuan hak asasi masyarakat adat dan lokal serta perluasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

10. Industri, Perdagangan dan Koperasi

- Tersedianya produk souvenir dan makanan olahan unggulan yang bercirikan khas daerah Kota Palangka Raya.
- Pengolahan sumberdaya alam dalam rangka meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai penggerak lokomotif perekonomian daerah
- Menjadikan Kota Palangka Raya sebagai tujuan Penanaman Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA)

11. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Terwujudnya sumberdaya manusia yang siap pakai
- Terciptanya standarisasi upah sesuai dengan kebutuhan hidup
- Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
- Pembinaan transmigrasi yang produktif.
- Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban tenaga kerja.

12. Kesehatan

- Masyarakat dapat menikmati hari tuanya dalam suasana lingkungan hidup yang bersih dan sehat dan akan mempunyai usia harapan hidup sehat yang semakin meningkat ditunjang dengan jaminan kesehatan.
- Fasilitas dan tenaga kesehatan dan berbagai peralatan teknis bidang kesehatan lengkap di Palangka Raya dan mampu untuk dijangkau oleh masyarakat.

- Kualitas sanitasi lingkungan yang baik apabila masyarakat Kota Palangka Raya semakin berkualitas ditinjau dari sisi perekonomian dan pendidikan.

13. Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

- APM dan APK dari PAUD sampai dengan menengah tuntas paripurna
- Peningkatan kuantitas dan kualitas input Perguruan Tinggi bertaraf Internasional
- Meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas internasional
- Pencapaian/peningkatan prestasi olah raga skala nasional dan internasional
- Pemantapan sarana dan prasarana pendidikan, pemuda dan olah raga.

14. Informasi Pariwisata, Seni dan Budaya

- Jumlah wisatan yang datang ke Kota Palangka Raya sebanyak 1 juta orang.
- Membangun citra daerah, sehingga terbentuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuhnya sektor-sektor lainnya, seperti transportasi, telekomunikasi, industri, perdagangan dan investasi.
- Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan (*leading sector*) dan merupakan suatu instrumen untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dan sekaligus akan memperluas dan meratakan kesempatan berusaha, lapangan kerja serta memupuk rasa cinta tanah air.

15. Pekerjaan Umum

- Semua kelurahan di wilayah Kota Palangka Raya terjangkau oleh jaringan transportasi jalan mantap dan optimal.
- Drainase berfungsi optimal dan dapat menjangkau daerah rawan tergenang di seluruh Kota Palangka Raya
- Jangkauan pelayanan air bersih mencapai seluruh penduduk masyarakat Kota Palangka Raya.

16. Perhubungan dan Telekomunikasi

- Transportasi sungai semakin kurang peranannya sebagai alat transportasi utama namun beralih fungsi menjadi sarana rekreasi dan olah raga.
- Lapangan udara yang ada akan mampu didarati oleh pesawat berbadan lebar dengan frekwensi yang sesuai dengan kebutuhan warga kota.
- Jaringan informasi, komunikasi dan telekomunikasi dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Palangka Raya.
- Jaringan transportasi dalam kota terlayani dengan berbagai moda transportasi yang terintegrasi sehingga tepat waktu dan terjangkau bagi semua level sosial ekonomi (berkeadilan).

17. Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan

- Tersedianya kawasan terbuka hijau dan kawasan publik terbuka lainnya.
- Semakin tertatanya Kota Palangka Raya baik kualitas perencanaan pemanfaatan ruang serta kesesuaian rencana pemanfaatan ruang .
- Tersedianya taman kota yang mendukung keindahan dan lingkungan hidup yang sehat.

18. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

- Pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- Pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan (sustainable)
- Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah.

19. Pasar dan Kebersihan

- Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan bermanfaat guna.
- Tersedianya sarana dan prasarana pasar sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota.
- Tersedianya Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) yang memenuhi syarat ramah lingkungan.

20. Kependudukan dan Catatan Sipil

- Terlaksananya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

- Pelayanan prima dan on line

21. Satuan Polisi Pamong Praja

- Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Terwujudnya anggota Satpol PP yang handal dan professional
- Pedagang kaki lima (PKL) tertata dan tertib.
- Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang profesional.

22. Kesejahteraan Sosial

- Meningkatnya kualitas penanganan penyandang masalah sosial : anak terlantar, anak nakal, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, bekas narapidana dan keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana.
- Terentasnya penanganan fakir miskin.
- Terwujudnya Kerukunan umat beragama.
- Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya).
- Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan dan rehabilitasi anak nakal, penyandang CACAT, tuna fusila dan bekas narapidana
- Terwujudnya UPTD-LBK kesejahteraan Sosial Palangka Raya

23. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

- Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial, politik dan hukum.
- Terwujudnya peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya.
- Terwujudnya pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat Kota Palangka Raya sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- Terwujudnya kebijakan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum dan ketenagakerjaan.

- Terwujudnya wadah untuk mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan.
- Mewujudkan kebijakan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan perlindungan anak di Kota Palangka Raya.
- Mewujudkan perencanaan, pemantauan, evaluasi PUG dan PUA di Kota Palangka Raya.
- Terkendalinya pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk.
- Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan keluarga kecil yang berkualitas sebagai pusat pembelajaran dan pembudayaan nilai-nilai keluarga kecil bahagia sejahtera.
- Meningkatnya penguatan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Palangka Raya.

24. Pemberdayaan Masyarakat

- Penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Pemantapan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
- Pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat
- Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
- Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemerintahan kelurahan
- Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.

25. Badan Ketahanan Pangan

- Menjaga dan memenuhi ketersediaan pangan serta ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah.
- Terbinanya kegiatan penyuluhan yang handal serta berorientasi memajukan perekonomian pedesaan.

26. Pengelolaan Data Elektronik , Perpustakaan dan Kearsipan.

- Tersedianya aparatur pengelola perpustakaan
- Perpustakaan yang mampu memberikan pelayanan prima

- Pelayanan perpustakaan kepada masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang
- Tertatanya arsip dan dokumen SKPD jajaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya

27. Pelayanan Perijinan Terpadu

- Proses perijinan dilayani dalam satu atap melalui penerapan pelayanan prima.
- Informasi perizinan dan non perizinan dapat disajikan dan diakses secara cepat, tepat dan akurat.
- Tersedianya Aparatur perizinan yang berkualitas.

KONDISI UMUM EKONOMI DAN INVESTASI YANG DIHARAPKAN

Kondisi ekonomi dan investasi Kota Palangka Raya dalam periode RPJP adalah sebagai berikut:

- Laju Pertumbuhan ekonomi:

Tahun 2007 – 2010:	> 5,50 %
Tahun 2011 – 2015:	> 6,00 %
Tahun 2016 – 2020:	> 6,50 %
Tahun 2021 – 2025:	> 7,00 %
Tahun 2026 – 2028:	> 7,50 %

- Sumbangan lapangan Usaha Industri dalam PDRB:

Tahun 2007– 2010:	>7,0 %
Tahun 2011 – 2015:	> 8,0 %
Tahun 2016 – 2020:	>10,0 %
Tahun 2021 – 2025:	>15,0 %
Tahun 2026 – 2028:	> 18,0 %

➤ ICOR

Tahun 2007– 2010:	< 7,5
Tahun 2011 – 2015:	< 7
Tahun 2016 – 2020:	< 6,8
Tahun 2021 – 2025:	< 6
Tahun 2026 – 2028:	< 5,8

KONDISI UMUM PEMERINTAHAN YANG DIHARAPKAN

Kondisi Pemerintahan Kota Palangka Raya dalam periode dua puluh tahun ke depan adalah:

- Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN.
- Pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin dan etos kerja, serta kesejahteraan pegawai yang semakin membaik.
- Semua Satuan kerja Perangkat Daerah menerapkan Pelayanan Prima.
- Tertib administrasi kependudukan
- Semua anak masyarakat kota Palangka Raya tercatat kelahirannya.
- Satu orang satu Kartu Tanda Penduduk (tidak ada KTP ganda).
- Terwujudnya pengembangan sistem informasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan melalui sarana dan prasarana teknologi (database).
- Tertata, terjaga dan terbinanya kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Kota Palangka Raya.
- Informasi perizinan dan non perijinan dapat disajikan secara cepat, tepat dan akurat.
- Proses perijinan dilayani dalam satu atap melalui penerapan pelayanan prima. Dengan demikian sumbangan PAD dalam APBD diproyeksikan sebagai berikut:

2007 – 2010	> 10 %
2011 – 2015	> 15 %
2016 – 2020	> 18 %
2021 - 2025	> 20 %
2026 – 2028	> 23 %

- Meningkatnya kemampuan dan peranan aparat Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan administrasi dan pelayanan publik.
- Terciptanya sinergisitas yang semakin meningkatnya antara eksekutif dan legislatif dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Terlaksananya pemilihan umum dan pemilihan Pilkada dengan suasana demokrasi yang aman dan berkualitas.

BAB III

VISI DAN MISI

A. PENGANTAR

Rencana pembangunan harus terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Optimalisasi partisipasi dan peran para pelaku pembangunan harus ditingkatkan secara terkoordinir untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan menuju masyarakat adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mengacu pada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan mempertimbangkan konteks wilayah, tantangan pembangunan daerah yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka visi dan misi pembangunan Kota Palangka Raya dalam jangka 2008 hingga 2028 adalah seperti yang diuraikan pada bagian berikut ini :

B. VISI PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi pemerintah.

Visi pembangunan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA YANG BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG”

Dalam visi tersebut terkandung perikehidupan Kota (nilai-nilai) yang diidam-idamkan bersama, yaitu :

- 1) Tertata dan Berwawasan Lingkungan : Bahwa Palangka Raya sebagai Ibukota Propinsi dan sekaligus Wilayah Kota, secara langsung ataupun tidak langsung mencerminkan citra Kalimantan Tengah. karena itu pembangunan kota harus teratur, tertib, menampilkan nilai-nilai budaya lokal yang relevan serta mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
- 2). Sejahtera : Adalah kondisi, tingkat dan derajat perubahan kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya
- 3) Masyarakat Sejahtera. Adalah terciptanya kondisi kehidupan masyarakat dengan rasa aman dan damai sehingga mampu untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk membangun kesejahteraannya: Bahwa Kondisi aman yang didambakan adalah semakin berkurangnya perasaan traumatik di kalangan penduduk Kota Palangka Raya pasca konflik etnik, terciptanya rasa tenteram dalam kehidupan masyarakat, tegaknya supremasi hukum karena didukung oleh aparat yang bersih dan berwibawa. Kondisi internal yang demikian akan membangun citra pihak luar, termasuk calon Investor bahwa Kota Palangka Raya sudah aman dan prospektif untuk dikunjungi dan berusaha.
Kehidupan sejahtera ditandai dengan sedikitnya 3 hal, yaitu (1) Kecukupan (*sustenance*); (2) meningkatkan harga diri/martabat (*self esteem*); dan (3) kebebasan memilih dan berpartisipasi (*freedom*).
- 3) Falsafah Budaya Betang : Falsafah Budaya Betang perlu diangkat diperkenalkan serta dihayati oleh masyarakat Kota Palangka Raya. Budaya ini digali dan dibangun dari nilai-nilai, norma-norma dan adat istiadat suku Dayak yang berlaku dan masih relevan dengan kehidupan modern (setelah disaring oleh nilai-nilai Pancasila). Budaya Betang mengandung nilai-nilai peradaban, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung (belom-bahadat), kerukunan, toleransi, demokrasi (penyang hinje simpei), kesatriaan (mahaga petak-danom), kepemimpinan dan kebersamaan.

MISI PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2008 – 2028

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran organisasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Guna mencapai visi sebagaimana ditetapkan di depan maka dirumuskan misi pembangunan Kota Palangka Raya sebagai berikut

- 1. Mewujudkan Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berorientasi Global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumberdaya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil;**
 - 2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan;**
 - 3. Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang terencana, tertata dan berkualitas;**
 - 4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri;**
 - 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi falsafah budaya betang;**
 - 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) (aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.**
-
- 1) Mewujudkan Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berorientasi Global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumberdaya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil;**

Pembangunan Kota Palangka Raya dalam jangka panjang harus tetap mengedepankan pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing baik dalam dalam aras regional, nasional maupun global, memiliki etos kerja tinggi, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpijak pada landasan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudaya betang yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Guna lebih memfokuskan pembangunan kualitas sumberdaya manusia dimaksud maka sangat strategis apabila Kota Palangka Raya dibangun sebagai Kota Pendidikan bagi Kalimantan Tengah yang akan memberikan dasar-dasar keilmuan dan ketrampilan untuk menempa diri menjadi manusia yang berkualitas yang akan mampu bersaing di era globalisasi yang adalah tantangan nyata bagi seluruh insan dalam kurun waktu dua puluh tahun mendatang.

2) **Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wistaa yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan;**

Bahwa Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi dan terletak ditengah-tengah provinsi Kalimantan Tengah mempunyai posisi yang strategis sebagai pusat informasi dan komunikasi bagi berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial budaya termasuk juga pariwisata. Untuk itu pembangunan Kota Palangka Raya harus memberi ruang yang cukup bagi pengembangan dan pelayanan berbagai bidang jasa dengan tetap memperhatikan budaya daerah dan tentu sangat peduli dengan keadaan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

3) **Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang terencana, tertata dan berkualitas;** Bahwa tersedianya prasarana dan sarana yang memadai dan maju akan mendorong transaksi ekonomi, interaksi sosial, meningkatnya rasa memiliki di kalangan masyarakat, sehingga seluruh *stakeholders* dapat berpartisipasi. Harus tetap dijaga peranan Pemerintah Kota sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat; seperti jasa transportasi, kelistrikan, air bersih, peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan teknologi informasi.

4) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri;

Terbangunnya iklim berusaha yang kondusif didukung oleh tersedianya prasarana dan sarana yang memadai, akan mendorong terbentuknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah Kota Palangka Raya. Sektor pertanian dalam arti luas dan pertambangan, serta jasa dikembangkan agar menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditas berkualitas. Industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya semakin meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing. Untuk itu maka dalam pembangunan Kota Palangka Raya harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi dan upaya konservasi; pemanfaatan ekonomi Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi falsafah budaya betang; Bahwa pembangunan pendidikan, jasa, sarana prasarana untuk menunjang kegiatan perekonomian dan pemerintahan adalah dimaksudkan untuk membangun masyarakat Kota Palangka Raya yang sejahtera. Untuk itu maka kehidupan di Kota Palangka Raya haruslah terlebih dahulu harmonis, dinamis, rukun dan damai. Kehidupan yang demikian diharapkan akan mampu untuk memberikan ruang gerak dan waktu yang luas bagi seluruh komponen masyarakat untuk menjalani dan melaksanakan kegiatan sehari-harinya tanpa kuatir terhadap berbagai gangguan keamanan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu maka

dalam rangka memperkuat jati diri dan membangun kehidupan masyarakat yang dinamis dan kreatif, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu ditanamkan kepatuhan terhadap aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial dan memiliki kebanggaan sebagai anak bangsa yang hidup di Bumi Tambun Bungai dalam rangka memantapkan landasan spritual, moral dan etik pembangunan Kota Palangka Raya sebagai penerapan nilai-nilai budaya betang.

6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) (aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Palangka Raya maka dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu diterapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, berorientasi pada masyarakat (*people center oriented*), sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*socially accepted*), selaras dengan budaya setempat (*culturally appropriate*), berwawasan lingkungan (*environmentally sound*) dan tidak diskriminatif (*non discriminative*).

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PRIORITAS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN

Misi untuk mewujudkan Visi Kota Palangka Raya yang tertata, tertib dan berwawasan lingkungan, dalam suasana kehidupan masyarakat yang aman sejahtera dan dinamis sesuai budaya betang dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan Kota Palangka Raya. Bab ini akan menguraikan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kota Palangka Raya dari setiap misi.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 1. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berorientasi Global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumberdaya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil;**

Untuk mewujudkan misi pertama ini maka fokus perhatian pemerintah Kota Palangka Raya adalah memperhatikan dengan seksama pembangunan dalam Bidang Pendidikan, Kependudukan dan keluarga sejahtera, Kesehatan Masyarakat, serta pemuda dan olah raga. Untuk itu kebijakan yang harus ditempuh adalah:

1.1. Bidang Pendidikan

Arah kebijakan pendidikan untuk menciptakan Kota Palangka Raya sebagai komunitas pendidikan dengan militas pendidikan (formal non formal dan informal, dan informal) yang baik, didukung oleh fasilitas, sarana, prasarana dan tenaga kependidikan yang memadai.

- a. Percepatan dan perluasan akses pendidikan pada semua jenjang (PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang diarahkan pada :
 - Meningkatnya dan memperluas daya tampung satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik.

- Meminimalkan hambatan biaya (cost barriers) melalui bantuan / subsidi biaya pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- b. Peningkatan kualitas PAUD, pendidikan dasar dan menengah, diarahkan pada :
- Meningkatnya kualitas lulusan PAUD, pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Meningkatnya kualitas lulusan PAUD, pendidikan dasar dan menengah yang diarahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memiliki daya saing.
- c. Percepatan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing diarahkan pada :
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan baik pada pendidikan formal maupun non formal dan informal.
 - Meningkatkan kapasitas profesi tenaga pendidik dan kependidikan.
 - Perbaikan sarana dan bahan ajar termasuk optimalisasi fungsi teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan.
 - Pembangunan dan Perbaikan infrastruktur pendidikan dengan memperhatikan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
- d. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan non formal dan informal, budaya pembelajaran, perpustakaan dan kearsipan, diarahkan pada :
- Meningkatnya keberfungsian satuan-satuan pendidikan non formal dan informal.
 - Meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan non formal dan informal.
 - Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dengan penyediaan sarana dan prasarana

perpustakaan, pusat-pusat pembelajaran masyarakat untuk menunjang budaya belajar masyarakat.

- Penguatan sinergi antara perpustakaan daerah dengan perpustakaan di satuan pendidikan dan taman bacaan masyarakat.
 - Tersosialisasi budaya pembelajaran dan jam belajar masyarakat kepada orang tua, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kota Palangka Raya.
- e. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan secara adil di kota Palangka Raya, diarahkan pada :
- Meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada prestasi dan profesi.
 - Meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di lokasi terpencil
- f. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan, penelitian dan pengembangan pendidikan, diarahkan pada :
- Meningkatnya kualitas manajemen di satuan-satuan pendidikan dan pusat-pusat pembelajaran.
- g. Pengelolaan keragaman budaya untuk peningkatan kualitas hidup bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, diarahkan pada :
- Meningkatnya pelestarian (pembudayaan) nilai-nilai budaya, kesejarahan dan kepurbakalaan.
 - Meningkatnya keberfungsiaan objek-objek wisata di kota Palangka Raya sebagai pusat pelestarian (pembudayaan) nilai-nilai budaya, kesejarahan dan kepurbakalaan.
 - Meningkatnya dialog antar budaya lokal dan nasional untuk memperkuat kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara serta penguatan persatuan dan kesatuan bangsa *sesuai dengan falsafah Budaya Betang*.

1.2. Bidang Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga dimaksudkan untuk menciptakan generasi muda yang tangguh, kreatif dan mampu bersaing serta memberdayakan pola hidup sehat melalui aktivitas olahraga. Pengembangan olahraga juga dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air dan sportivitas serta merupakan salah satu potensi membuka lapangan kerja.

Peningkatan kualitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di Kota Palangka Raya, diarahkan pada :

- Mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan dan olah raga di Kota Palangka Raya.
- Meningkatnya wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan Kota Palangka Raya.
- Meningkatnya penguatan kelembagaan pemuda untuk peningkatan partisipasi pembangunan Kota Palangka Raya.
- Meningkatnya prestasi olahraga Kota Palangka Raya pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional
- *Meningkatnya ketersediaan dana dari pemerintah di bidang pemuda dan olahraga.*
- Meningkatnya partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olah raga di Kota Palangka Raya.
- Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Palangka Raya yang tersebar sampai ke pelosok wilayah.
- Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olah raga tradisional dalam rangka melestarikan budaya bangsa.

1.3. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan pada :

- Menyiapkan Perda tentang Administrasi Kependudukan untuk mendukung Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.
 - Menyiapkan Sarana dan Prasarana untuk Pengoperasian SIAK.
 - Meningkatkan Koordinasi dan Informasi ke Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Lainnya.
 - Pengolahan data dalam penyusunan laporan Informasi Kependudukan.
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
- b. Distribusi dan alokasi penduduk yang seimbang antar wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya, diarahkan pada :
- Meningkatnya peran dan kualitas program transmigrasi sebagai strategi percepatan pengembangan wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Bidang Kesehatan Masyarakat

Arah kebijakan kesehatan dimaksudkan untuk menetapkan akses seluas-luasnya bagi seluruh warga Kota Palangka Raya dalam mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk hidup sehat dalam suasana kehidupan yang ramah bersih lingkungan dan serasi dengan alam.

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, diarahkan pada:
- Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, disemua jenjang pelayanan kesehatan.
 - Terpenuhinya standard profesi kesehatan seluruh SDM kesehatan.

- b. Pendidikan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat, diarahkan pada:
- Terbudayakannya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga kualitas kesehatan lingkungan.
- c. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini, diarahkan pada :
- Terwujudnya upaya pelayanan kesehatan bersumber dari masyarakat, seperti pos kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah.
- d. Penataan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin, diarahkan pada :
- Terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan pra upaya jaminan pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin secara berkelanjutan.
 - Meningkatnya kualitas pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat, baik yang dikelola masyarakat maupun yang dikelola oleh Pemerintah kota Palangka Raya.
- e. Pengawasan obat dan makanan serta ketersediaan obat, diarahkan pada :
- Meningkatnya jaminan keamanan pangan dan pengendalian bahan berbahaya.
 - Pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
 - Meningkatnya mutu, khasiat dan keamanan produk terpetik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika.
 - Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan baku mutu.

- Meningkatnya pemerataan sosial dan perbekalan kesehatan.
 - Meningkatnya keterjangkauan *atau adanya jaminan* penduduk miskin terhadap obat dan perbekalan kesehatan.
 - Meningkatnya pemanfaatan obat bahan alam lokal (Kalimantan).
 - Terwujudnya standardisasi tanaman obat bahan alam lokal (Kalimantan).
- f. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas unit pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke seluruh wilayah, diarahkan pada:
- Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya.
 - Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan dasar, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 - Terwujudnya peningkatan imunisasi
 - Terlaksananya peningkatan status gizi
 - Tertanggulangnya kurang energi protein (KEP), anemia gizi/besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
 - Meningkatnya peran serta masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
 - Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit rujukan secara berjenjang.

2. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan;

Untuk mewujudkan misi kedua maka sangat diharapkan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya memperhatikan dengan seksama pembangunan dalam Bidang Pariwisata, Tata Ruang dan Pertanahan. Untuk itu kebijakan yang harus ditempuh adalah:

Bidang Pariwisata

Peningkatan daya saing pariwisata melalui pengelolaan destinasi wisata secara optimal dan peningkatan kualitas pemasaran untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diarahkan pada :

1. Meningkatkan gerakan sadar wisata di kalangan masyarakat baik sebagai tuan rumah maupun sebagai pelaku usaha sehingga masyarakat bisa bertindak sebagai tuan rumah dalam kunjungan wisatawan.
2. Mendorong pengembangan obyek wisata unggulan di Kota Palangka Raya berupa wisata alam yang didukung oleh atraksi wisata (wisata buatan manusia dan wisata budaya), MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) dan wisata rohani.
3. Mengembangkan Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong sebagai Desa Wisata untuk meningkatkan daya saing Kota Palangka Raya sebagai salah satu daerah tujuan wisata penting di wilayah tengah Indonesia, bersamaan dengan penggalan potensi pada setiap kelurahan.
4. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pariwisata khususnya di sepanjang Sungai Kahayan dan Rungan berupa dermaga desa, kegiatan kebudayaan dan kesenian di tiap kelurahan, fasilitas penginapan, sarana air bersih, pelayanan kesehatan dan jalan desa.
5. Membangun pusat cinderamata dan pusat informasi wisatawan (tourist information center) sebagai pusat pemasaran pariwisata yang memanfaatkan berbagai media.

6. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata, investor, dunia usaha dan pemerintah daerah lain dalam rangka peningkatan kerjasama destinasi dan pemasaran pariwisata.
7. Peningkatan dan pengembangan kreatifitas seni budaya, apresiasi seni, peletarian benda cagar budaya dalam bentuk konsevasi budaya dan penyebaran kegiatan kesenian di tiap – tiap kelurahan.
8. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam ekstrakurikuler bidang kesenian dan budaya serta dinas terkait lainnya.

3. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang terencana, tertata dan berkualitas;

Untuk mewujudkan misi ketiga maka sangat diharapkan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya memperhatikan dengan seksama pembangunan dalam Bidang Sarana dan Prasarana Umum. Untuk itu kebijakan yang harus ditempuh adalah Pembangunan sarana dan prasarana umum untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang aktivitas seluruh warga Kota Palangka Raya, menunjang kegiatan ekonomi, menembus keterisolasian wilayah dan mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota Cantik dalam arti yang sebenarnya.

- a. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum, diarahkan pada :
 - Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas barang, jasa dan orang pada semua jenis moda transportasi.
 - Meningkatnya pelayanan parkir kendaraan bermotor yang tertib dan aman.
 - Meningkatnya kelancaran dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.
 - Meningkatnya pelayanan kendaraan wajib uji untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan untuk menciptakan tertib lalu lintas dan aman di jalan raya.
 - Meningkatnya pelayanan penumpang umum yang melalui terminal angkutan penumpang umum agar sampai tujuan

dengan selamat dan biaya terjangkau oleh masyarakat pengguna jasa angkutan penumpang umum.

- Meningkatnya pelayanan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
- Meningkatnya pelayanan jasa Komunikasi dan Informatika (kominfo).
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan, permukiman, lingkungan sehat dan komunitas perumahan.
- Meningkatnya kualitas pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, kawasan tertinggal dan keterkaitan antar wilayah.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum bersih dan sehat dan meningkatnya pengelolaan air limbah.
- Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Jalan Raya.

b. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, diarahkan pada :

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum lingkungan sekitarnya.
- Meningkatnya kualitas ketertiban bangunan dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan indah.
- Meningkatnya kualitas kemitraan pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) serta perumahan dan permukiman.

Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Pelayanan Bidang Sarana dan Prasarana Umum, diarahkan pada :

- Meningkatnya kemampuan penerapan teknologi konstruksi dan uji mutu konstruksi.
- Meningkatnya kebijakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum.

4. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri;

Untuk mewujudkan misi kedua maka sangat diharapkan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya memperhatikan dengan seksama pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup. Untuk itu kebijakan yang harus ditempuh adalah:

Bidang Ekonomi

Pembangunan perekonomian daerah diupayakan dengan mengembangkan produk-produk yang berbasis pada kekayaan sumberdaya lokal dan mempunyai pasar lokal/regional.

- 1). Pertanian Dalam Arti Luas
 - a. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan dan Ketahanan Pangan, diarahkan untuk :
 - Meningkatnya ketahanan pangan di tiap daerah di Kota Palangka Raya.
 - b. Peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk unggulan yang mempunyai daya saing regional dan nasional, diarahkan untuk:
 - Terwujudnya struktur perekonomian yang dibangun dari sektor agribisnis dan agroindustri yang maju dan kompetitif.
 - c. Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan, diarahkan untuk :
 - Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan berbasis pada pengelolaan pertanian dan perikanan yang maju dan kompetitif.
 - d. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dengan tetap menjaga kelestariannya, diarahkan untuk:
 - Meningkatnya jumlah produksi, mutu, nilai tambah dan pemasaran produk hasil perikanan.

- Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya perikanan secara terkelolanya ekosistem sumberdaya perikanan secara lestari.
- e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil dengan menjaga kelestarian ekosistem, yang diarahkan untuk :
- Pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari dengan memperhatikan faktor ekonomi, ekologi dan sosial budaya dalam arti luas,
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat sumberdaya hutan dalam arti luas,
 - Terwujudnya pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman,
 - Pemanfaatan hasil sumber daya hutan yang tepat guna, berdaya guna dan efisien,
 - Terwujudnya sumberdaya hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan.
- f. Peningkatan pemanfaatan lahan yang potensial untuk usaha perkebunan yang diarahkan melalui :
- Terwujudnya perkebunan rakyat yang dapat menunjang kesejahteraan rakyat,
 - Terwujudnya Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal,
 - Terwujudnya industri perkebunan yang tepat guna,
 - Terwujudnya ekspor hasil perkebunan yang berdaya saing nasional maupun internasional.
- g. Peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan, diarahkan untuk :
- Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

2). Pertambangan

Peningkatan pengelolaan potensi pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diarahkan pada :

- Pembinaan dan pengawasan terhadap penambangan di sekitar obyek wisata.
- Memanfaatkan potensi pertambangan, termasuk jasa – jasa lingkungan, secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian daerah.
- Mengembangkan sistem pengelolaan pertambangan yang matang yang disertai penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, pengakuan hak asasi masyarakat adat dan lokal serta perluasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3). Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi, Perindustrian serta Perdagangan/Dunia Usaha

a. Peningkatan Sentra/klaster, KSP-KOP dan jasa konsultasi Pengembangan Bisnis UMKM dan Koperasi, diarahkan untuk

- Meningkatnya kemampuan dunia usaha di kota Palangka Raya dalam meningkatkan daya saing perusahaan pada semua sektor.
- Meningkatnya sentra/klaster dan KSP/USP-Kop dalam peningkatan aksesibilitas usaha.
- Meningkatnya peran lembaga-lembaga pendidikan dalam pengembangan daya saing usaha.

b. Peningkatan kinerja pembinaan serta fasilitasi pengembangan UMKM/IKM/Koperasi.

- Meningkatkan segi pembinaan usaha bagi UMKM/IKM/Koperasi di Kota Palangka Raya.
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan perusahaan di sektor perdagangan.

- Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM/IKM/Koperasi
- c. Peningkatan stabilitas perekonomian, yang diarahkan pada :
 - Meningkatnya ketersediaan pasokan dan stabilitas harga dari sembilan bahan pokok, bahan bakar minyak serta barang-barang strategis lain sesuai dengan kondisi permintaannya.
 - Meningkatnya kepastian transaksi perekonomian di seluruh wilayah Kota Palangka Raya.
 - d. Peningkatan pengawasan barang/jasa dan perlindungan konsumen
 - e. Peningkatan pembinaan/pengembangan usaha kecil/mikro dan koperasi guna menunjang pengentasan kemiskinan, melalui :
 - Bimbingan usaha/manajemen usaha
 - Fasilitasi permodalan dan pemasaran
 - f. Peningkatan pertumbuhan usaha UMKM/IKM/Koperasi baru dalam rangka peningkatan lapangan kerja.
 - g. pertumbuhan usaha UMKM/IKM/Koperasi yang memiliki potensi ekspor.
- 4). Penanaman Modal
 - a. Peningkatan penanaman modal dengan memperkuat iklim investasi dan realisasi investasi, promosi investasi dan kerjasama investasi diarahkan pada :
 - meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi dalam bidang penanaman modal, meningkatnya promosi dan kerjasama investasi dalam bidang penanaman modal
 - b. Peningkatan kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal diarahkan pada :
 - Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelayanan perijinan dan pelayanan fasilitas penanaman modal di Kota Palangka Raya.

- c. Peningkatan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal diarahkan pada :
 - Meningkatnya pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengendalian penanaman modal kota.
 - d. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal diarahkan pada :
 - Membangun dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal kota.
 - e. Peningkatan penyebaran pendidikan dan pelatihan dibidang penanaman modal diarahkan pada :
 - Melaksanakan sosialisasi atas kebijaksanaan dan perencanaan, pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perijinan, pengendalian, pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal Kota Palangka Raya.
- 5). Ketenagakerjaan
- a. Perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja produktif di pedesaan maupun perkotaan, diarahkan pada :
 - Mengurangi tingkat pengangguran dan setengah penganggur, baik yang bertempat di pedesaan maupun di perkotaan.
 - b. Peningkatan kualitas dan produktivitas angkatan kerja produktif
 - Meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja, antara lain kualitas tenaga kerja di bidang kepariwisataan.
 - c. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
 - Terciptanya ketenagan berusaha dan bekerja antara pelaku produksi (Industrial Piace).

Bidang Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi manfaatnya bagi generasi yang akan datang.

- 1) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan
 - Menjadikan lingkungan sebagai issue strategis sekaligus mendorong pola produksi dan konsumsi yang mengarah pada penerapan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
 - Pendekatan pada kearifan lingkungan lokal, karena masing-masing daerah memiliki ke-khasannya masing-masing.
- 2) Peningkatan kapasitas sarana, prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia, diarahkan pada :
 - Tersedianya sarana, prasarana pengelolaan laboratorium Sumber Daya Alam yang mampu mendukung berbagai kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian lingkungan hidup.
 - Terwujudnya penemuan serta pemanfaatan teknologi tepat guna yang mampu mengefisienkan serta mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam.
 - Terwujudnya penggunaan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
- 3) Pengembangan wadah koordinasi pengendalian lingkungan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pelaku yang berkelanjutan, diarahkan pada :
 - Meningkatkan peranan forum yang bersifat lintas sektoral serta *multi stakeholder* untuk sinkronisasi kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian lingkungan hidup.
- 4) Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup, diarahkan pada :
 - Mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup.

- Mewujudkan kesadaran hukum pada berbagai *stakeholder* daerah terkait pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
 - Mewujudkan fasilitasi yang terstruktur terhadap penegakan hukum lingkungan di Kota Palangka Raya.
- 5) Peningkatan pola pemanfaatan sumber daya alam yang aman dan ramah lingkungan, diarahkan pada :
- Terwujudnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang handal dalam mengembangkan serta mengimplementasi pola pemanfaatan sumber daya yang aman serta ramah lingkungan.
 - Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup.
 - Terjaganya keseimbangan ekosistem dalam menunjang aktivitas sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
 - Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya perikanan dan pertambangan di wilayah Daerah Sungai (DAS)
 - Terwujudnya ketertiban pemanfaatan sumber daya pertambangan yang aman dan ramah lingkungan.
 - Terwujudnya ketertiban dalam pengelolaan sumber daya air bawah tanah.
 - Terwujudnya pelayanan perijinan pertambangan yang responsif dan mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - Terwujudnya koordinasi lintas sektoral dan multi stakeholder dalam eksplorasi sumber daya pertambangan.
 - Meningkatnya pengendalian limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
- 6) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha (Perusahaan, Koperasi, dll) dalam menyeimbangkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang serasi, diarahkan pada :
- Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, wilayah pertambangan dan wilayah perkebunan

- Melembaganya (terbudayakannya) kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan.
- Terwujudnya keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dalam menjaga keserasian pengelolaan dan pelestarian sumber daya pertambangan
- Terwujudnya pengawasan dan pengamanan yang efektif terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
- Terwujudnya kurikulum pendidikan berwawasan lingkungan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap alam sekitar.
- Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengendalian dan pengembangan sumber daya alam.

5. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi falsafah budaya betang;

Untuk mewujudkan misi kedua maka sangat diharapkan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya memperhatikan dengan seksama pembangunan dalam Bidang Kesejahteraan Sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk itu kebijakan yang harus ditempuh adalah:

1). Kesejahteraan Sosial

a. Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, diarahkan pada :

- Meningkatnya ketahanan sosial , pendayagunaan potensi keluarga dan profesionalisme pelayanan sosial keluarga.
- Meningkatnya kualitas hasil rehabilitasi sosial tuna sosial.
- Meningkatnya kualitas hasil rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)

- Meningkatnya kualitas hasil rehabilitasi sosial penyandang cacat
 - Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia.
 - Meningkatnya kualitas pembinaan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak terlantar.
 - Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial anak cacat
 - Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan dan rehabilitasi anak nakal.
- b. Pengembangan kemitraan dan aktualisasi potensi sosial dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, diarahkan pada:
- Meningkatnya keberdayaan Karang Taruna dalam kerangka berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
 - Meningkatnya keberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) dan Organisasi Sosial dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial.
 - Meningkatnya keberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial
 - Meningkatnya kualitas hasil kerjasama lintas sektor dunia usaha dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
 - Meningkatnya pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
 - Meningkatnya pelestarian nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.
 - Meningkatnya peran aktif keluarga dan masyarakat dalam program bantuan sosial.
 - Meningkatnya keberdayaan PKK dalam menjalankan misi kesejahteraan sosial.
 - Meningkatnya keberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat.

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat.
- c. Pengembangan inisiatif dan prakarsa dan kebijakan antisipatif terhadap bencana alam dan sosial, diarahkan pada :
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah bencana lainnya (satuan tugas sosial).
 - Meningkatnya keberdayaan sosial korban bencana
 - Meningkatnya perlindungan sosial tindak kekerasan
 - Terwujudnya akses jaminan sosial.
- 2). Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak serta peningkatan kualitas keluarga sejahtera, diarahkan pada :
- Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial, politik dan hukum.
 - Terwujudnya peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya.
 - Terwujudnya ketersediaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
 - Terwujudnya pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat Kota Palangka Raya sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - Terwujudnya peningkatan peran masyarakat dan media massa dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi.
 - Terwujudnya kebijakan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum dan ketenagakerjaan.

- Meningkatnya hasil komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program peningkatan kesehatan dan perlindungan anak serta keadilan dan kesetaraan gender (KKG).
- Terwujudnya sistem penanganan hukum yang ramah anak, termasuk perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, trafiking dan perlakuan salah lainnya.
- Terwujudnya wadah untuk mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan.
- Mewujudkan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat Kota Palangka Raya termasuk pusat studi wanita/gender.
- Mewujudkan kebijakan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak perlindungan anak di Kota Palangka Raya.
- Mewujudkan perencanaan, pemantauan, evaluasi PUG dan PUA di Kota Palangka Raya.
- Mewujudkan kebijakan dan peraturan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi hak-hak anak.
- Mewujudkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, peraturan perundangan dan program pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

3). Pemberdayaan Masyarakat

Arah Kebijakan pemberdayaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat menuju suatu kondisi dinamis yang meningkatkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada padanya, yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pelaku pemberdayaan masyarakat.

- Pemantapan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.
- Pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan.
- Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemerintahan kelurahan.

6. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) (aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk menciptakan pemerintahan yang adil, efektif, efisien dan respektif terhadap kepentingan masyarakat sekaligus menjamin asas kepastian hukum dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

- 1). Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Responsif
 - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah ini diarahkan pada :
 - Meningkatnya kapasitas kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik, diarahkan pada :
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palangka Raya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - Meningkatnya keberfungsian hasil pengaduan masyarakat untuk perbaikan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palangka Raya secara berkelanjutan.
 - c. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, diarahkan pada :

- Meningkatnya pelembagaan (pembudayaan) akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kota Palangka Raya.
 - Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kota yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab dalam melaksanakan otonomi daerah melalui pengawasan yang profesional.
 - Meningkatnya pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- d. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, diarahkan pada :
- Meningkatnya keberfungsian DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk percepatan perwujudan kewajiban daerah otonom.
 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPRD pada konstituennya dalam bidang politik.
 - Meningkatnya kualitas komunikasi politik
 - Meningkatnya kualitas kebijakan publik dan produk hukum Kota Palangka Raya.
- e. Pengelolaan Sumber daya Manusia Aparatur, diarahkan pada :
- Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya manusia untuk mendukung peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palangka Raya.
- f. Peningkatan profesionalisme aparat Pemerintah Kota Palangka Raya, diarahkan pada :
- Meningkatnya profesionalitas aparat Pemerintah Kota Palangka Raya
- g. Peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya, diarahkan pada:
- Meningkatnya hasil dan kinerja pengelolaan dan manajemen keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- h. Peningkatan kerukunan hidup ini diarahkan pada :
 - Meningkatnya keberfungsian kelembagaan politik yang dapat menserasikan penyaluran aspirasi berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat.
 - Meningkatnya keberfungsian Forum komunikasi dan Konsultasi Pembauran Bangsa yang merekatkan berbagai kelompok suku, ras dan agama dalam satu persepsi wawasan kebangsaan.
 - Meningkatnya keberfungsian kelembagaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
 - Terwujudnya stabilitas sosial dan politik di seluruh wilayah Kota Palangka Raya.
- i. Peningkatan kapasitas pelayanan informasi, kearsipan dan statistik yang diarahkan pada :
 - Menciptakan jalur komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat yang mampu menciptakan opini positif bagi kedua belah pihak.
 - Meningkatkan sarana dan fasilitas pelayanan informasi.
 - Membangun dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - Meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan peningkatan pelayanan publik.
 - Meningkatkan pelayanan kearsipan dan statistik bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

2). Keamanan dan Ketertiban Umum

- a. Pengembangan kebijakan pemerintahan yang profesional dalam penanganan permasalahan ketertiban dan ketentraman umum, diarahkan pada :
 - Terwujudnya Komunitas Intelegen Daerah (Kominda)
 - Meningkatnya kemampuan deteksi dini
 - Terwujudnya pengendalian dan pengawasan orang asing

- Terwujudnya pemahaman masyarakat dan siswa tentang dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba.
 - Terwujudnya sistem sosial kemasyarakatan anti narkoba
 - Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang handal dalam bidang perlindungan masyarakat.
 - Terwujudnya kapasitas sarana dan prasarana yang mendukung efektivitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Peningkatan ketertiban dan disiplin dalam penyampaian aspirasi, diarahkan pada :
- Terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam berbagai event daerah.
 - Terwujudnya pemasyarakatan keamanan dan ketertiban umum.
 - Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Terwujudnya ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat
 - Terwujudnya anggota Satpol PP yang handal dan profesional
 - Terwujudnya pedagang kaki lima (PKL) yang tertata dan tertib.
 - Terwujudnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - Meningkatnya pelayanan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui kesadaran masyarakat melapor (pengaduan) ke Satpol PP.
 - Meningkatnya fasilitas, sarana dan prasarana operasional Satpol PP
- c. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum, diarahkan pada :
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan.
 - Meningkatnya keberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa

- Terwujudnya masyarakat sadar hukum

3). Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai sarana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan pada :

- Melakukan aplikasi hasil – hasil penelitian dan pengembangan (Litbang) pada bidang pertanian, bidang manajemen, bidang teknologi informasi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan dalam upaya terbentuknya intermediasi yang efisien untuk meningkatkan daya difusi hasil riset dalam kegiatan ekonomi.
- Melakukan kajian penelitian dan pengembangan dalam bidang pemerintahan dan kesra serta ekonomi dan pembangunan.
- Mengembangkan jejaring kerja (net working) dengan lembaga – lembaga penelitian baik dalam maupun luar daerah.
- Penguatan kelembagaan litbang dengan membentuk Dewan Riset Kota Palangka Raya dan Forum Komunikasi Litbang.
- Memperluas pemanfaatan hasil teknologi tepat guna bagi masyarakat dan dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah.
- Meningkatkan apresiasi berbagai kalangan terhadap pentingnya peranan strategis penelitian dan pengembangan.

B. PRIORITAS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2008 - 2028

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang Kota Palangka Raya membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang ingin diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus

berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam lima misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

1). RPJM ke-1 (2008 – 2013)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM I (2008 – 2013) diarahkan untuk menata dan membangun Kota Palangka Raya di segala bidang yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kemajuan, kesejahteraan yang berkeadilan. *Pembangunan sumber daya manusia dan prasarana/sarana transportasi dan komunikasi untuk mendukung pembangunan pendidikan dan penyediaan berbagai jasa dalam upaya mendorong pembangun ekonomi rakyat adalah menjadi prioritas.* Bersamaan dengan itu, pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain, ditandai oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, adil dan bermartabat, berkepribadian tangguh, kompetitif, bermoral, dan berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong-royong, dinamis, dan berorientasi iptek; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; berkurangnya kesenjangan antar-wilayah; meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia di bidang pendidikan dan jasa dalam arti luas yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup di daerah pedesaan, menuju terbangunnya mata pencaharian yang berkelanjutan (sustainable livelihoods). Kondisi itu dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan, terutama untuk sektor transportasi, energi dan kelistrikan, dan sumber daya air.

Secara umum program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan menjadi tahapan dan skala prioritas agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah tahap ke-1 tahun 2008-2013 adalah :

1. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- a. Mengadakan Diklat Teknis, Fungsi dan struktural sesuai dengan bidangnya
- b. Menempatkan tenaga teknis sesuai dengan kualifikasi
- c. Pembuatan dan penerapan peraturan tentang kreativitas dan disiplin pegawai
- d. Meningkatkan disiplin, etik dan moral aparatur guna membangun sikap mental aparatur
- e. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi
- f. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin
- g. Menyusun pola hubungan tata kerja yang jelas.
- h. Menetapkan sistem dan prosedur pelayanan
- i. Mengembangkan budaya kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas serta memperbaiki persepsi, pola pikir, perilaku, etik dan moral aparatur.

2. DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- a. Mengutamakan sumber keuangan daerah melalui pajak dan retribusi daerah dengan jalan intensifikasi maupun diversifikasi.
- b. Meningkatkan pengendalian penerimaan dan pengeluaran keuangan maupun belanja daerah
- c. Pengadministrasian dan pengendalian terhadap asset daerah.
- d. Menetapkan sistem, dan pola manajemen terbuka dalam pelayananan.

3. BAPPEDA

- a. Koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Pengelolaan pusat data perencanaan daerah dan on line;
- c. Peningkatan Tim koordinasi Tata Ruang Daerah;
- d. Pembentukan dewan riset Kota;
- e. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja;
- f. Koordinasi penanaman modal;

4. INSPEKTORAT KOTA

- a. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut
- b. Meningkatkan keterampilan dan keahlian aparatur dalam pelaksanaan tugas pengawasan
- c. Meningkatkan pelayanan publik berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat
- d. Melaksanakan review atas laporan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya
- e. Melaksanakan evaluasi LAKIP bagi Pemerintah Kota Palangka Raya
- f. Melaksanakan gelar pengawasan tingkat Kota Palangka Raya
- g. Melaksanakan rekrutmen SDM pengawasan berbasis akuntansi dan disiplin lain yang relevan
- h. Mendukung tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan KKN
- i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tata kelola pemerintahan yang baik

- j. Meningkatkan kerjasama baik antar sesama (Aparat pengawasan intern pemerintah) maupun dengan Aparat Pengawasan Eksternal (BPK)

- k. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang

5. KESBANGLINMAS

- a. Pendataan dan penataan organisasi kemasyarakatan dan parpol.
- b. Peningkatan hubungan intern dan antar suku, agama, ras dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. SEKRETARIAT DPRD

- a. Peningkatan kualitas pelayanan tertib administrasi dan keuangan DPRD Kota Palangka Raya;
- b. Meningkatkan Kualitas Pengembangan SDM Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan Aparatur Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya;
- c. Meningkatkan kinerja Anggota Dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan membantu proses penyelesaian ;
- d. Meningkatkan peran serta sebagai mediator yang menjebatani kepentingan antara eksekutif dan legislatif;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana;
- f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara DPRD seluruh Indonesia ;

7. DINAS PERTANIAN

- a. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan. Pengembangan diversifikasi produk dan konsumsi pangan, pemanfaatan distribusi produk (perwilayahan komoditas unggulan).
- b. Pengembangan infrastruktur pertanian.
- c. Pengembangan teknologi spesifik lokal melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
- d. Peningkatan aplikasi teknologi.
- e. Pengembangan sistem alih teknologi.
- f. Pengelolaan dan pengawasan sumber daya pertanian yang lestari.
- g. Penyiapan Road Map Komoditas Unggulan
- h. Swasembada daging ayam broiler.
- i. Pengembangan perbenihan
- j. Pengembangan mekanisme subsidi pertanian.

- k. Pengembangan penyediaan pangan yang ASUH (70%)
- l. Pengembangan/peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

8. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- a. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung, produksi dan jasa lingkungan untuk mencapai keseimbangan ekologi, sosial, budaya dan ekonomi yang lestari.
- b. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), sumberdaya manusia yang profesional dan sarana/prasarana
- c. Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan lestari
- d. Peningkatan pemanfaatan lahan yang potensial untuk usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan local
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

9. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- a. Pengembangan teknologi pertambangan yang tepat guna dan berdaya guna
- b. Survey/geologi/pengembangan data potensi tambang
- c. Pengembangan energi alternatif berupa biogas
- d. Pengembangan energi alternatif berupa PLTS
- e. Pengembangan energi alternatif berupa biosel
- f. Pengembangan/penambahan jaringan listrik dan daya listrik
- g. Pengembangan/peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur
- h. Peningkatan pengawasan dan penertiban usaha pertambangan dan energi
- i. Pengembangan sarana dan prasarana
- j. Penanggulangan kerusakan lingkungan kawasan tambang
- k. Penanggulangan, pengawasan dan penertiban illegal mining
- l. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- m. Peningkatan pemanfaatan potensi tambang

10. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

- a. Penumbuhan koperasi berkualitas.
- b. Penumbuhan wirausaha baru.
- c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi dan UMKM.
- d. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi UMKM.
- e. Peningkatan sistem pendukung usaha Koperasi dan UMKM.
- f. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM..
- g. Peningkatan akses kepada sumberdaya produktif..
- h. Pengembangan kewirausahaan bagi koperasi dan UMKM yang berkeunggulan kompetitif.
- i. Peningkatan akses permodalan bagi kopersai dan UMKM.
- j. Pengembangan BDS sebagai kunsultan bagi kopersi UMKM.
- k. Pengembangan promosi produk koperasi dan UMKM.
- l. Pengembangan industri pengolahan komoditif unggulan daerah melalui pembinaan OVOP dan Kompetensi inti daerah.
- m. Menggali dan mengembangkan produk makan ringan tradisional (ciri khas daerah).
- n. Pengembangan produk kerajinan dan barang seni berbasis warisan budaya.
- o. Peningkatan jumlah unit usaha IKM..
- p. Peningkatan daya saing produk IKM di pasar local.
- q. Peningkatan standar, mutu dan desain produk.
- r. Peningkatan promosi dan pemasaran produk IKM.
- s. Peningkatan kompetensi SDM.
- t. Menjamin ketersediaan bahan baku.
- u. Peningkatan pelayanan prima di bidang perdagangan.
- v. Memberi informasi baik lokal, regional dan global secara berkesinambungan terhadap dunia usaha .
- w. Meningkatkan produk unggulan daerah, prepensi terhadap pengusaha pengguna produk dalam negeri / daerah dan promosi .
- x. Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri.
- y. Pembinaan dan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha melalui :
 - Sosialisas undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

- Sosialisasi undang-undang no. 2 Tahun 1981 Metrologi Legal.
- z. Mempalitisasi penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha..
- å. Melaksanakan barang beredar dan jasa.
- ä. Melaksanakan tera ulang alat UTP.
- cc. Melaksanakan pos ukur ulang.

11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga dan masyarakat transmigrasi
- b. Mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja
- c. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat
- d. Mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang ketenaga kerjaan menjadi institusi andalan dan menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman.
- e. Mengembangkan potensi sumberdaya kawasan dan memfasilitasi perpindahan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pemukiman
- f. Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah
- g. Meningkatkan kualitas pembinaan manajemen dan dukungan administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah

12. DINAS KESEHATAN

Sasaran : Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

- a. Meningkatkan perhatian khusus kepada pelayanan kesehatan ibu dan anak, masyarakat miskin dan masyarakat terpencil
- b. Meningkatkan penanggulangan penyakit, gizi buruk, keadaan darurat, dan masalah kesehatan akibat bencana, serta pengawasan kesehatan lingkungan
- c. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan kemampuan puskesmas dan peningkatan sistem rujukan
- d. Pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan (SDMK) untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.

- e. Peningkatan pembinaan, pengawasan, dan dukungan sumberdaya untuk pengembangan dan pemberdayaan SDM
- f. Meningkatkan upaya optimalisasi penyediaan obat, sarana, dan perbekalan kesehatan
- g. Melembagakan sistem asuransi kesehatan sosial
- h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
- i. Meningkatkan sistem administrasi kesehatan untuk menerapkan dasar-dasar sinergisme antara upaya-upaya pokok pembangunan kesehatan (upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan termasuk makanan/minuman, dan pemberdayaan masyarakat

13. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- a. APM dan APK PAUD tuntas Pratama
- b. APM dan APK pendidikan dasar tuntas paripurna
- c. APM dan APK pendidikan menengah madya
- d. Peningkatan kulatas pendidikan dasar dan menengah, penuntasan wajib belajar 9 tahun dan menuju wajib belajar 12 tahun
- e. Peningkatan kualitas akademik pendidik dan tenaga pendidik
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemuda dan olah raga.

14. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Target kunjungan wisatawan 200.000 orang dengan program

- a. Penyiapan masyarakat sebagai tuan rumah dan pelaku usaha
- b. Pengembangan destinasi termasuk sarana dan prasarana penunjang
- c. Pengembangan destinasi termasuk sarana dan prasarana penunjang
- d. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia
- e. Penyebarluasan kegiatan budaya ke seluruh pelosok wilayah
- f. Identifikasi obyek – obyek wisata untk menciptakan dan kondisi "one village one product"
- g. Penataan dan Revitalisasi peraturan perundangan di bidang pariwisata
- h. Promosi pariwisata dengan pencitraan.

15. DINAS PEKERJAAN UMUM

- a. Membuka keterisolasian daerah-daerah yang masih terisolir melalui pembangunan jalan dan jembatan khususnya di Kecamatan Rakumpit dan Kelurahan Kameloh Baru.
- b. Mempertahankan kondisi jalan mantap yang ada melalui Program Pemeliharaan Berkala Jalan dan Pemeliharaan rutin jalan
- c. Meningkatkan kemampuan pelayanan jalan yang sudah ada melalui perbaikan alinyemen, pelebaran dan melapis ulang permukaan dengan konstruksi yang lebih baik.
- d. Penanganan lokasi-lokasi yang selalu menjadi tempat genangan air melalui membangun dan menata ulang sistem drainase yang ada
- e. Memperhatikan kondisi saluran yang sudah baik agar tetap berfungsi melalui pemeliharaan rutin.
- f. Penyediaan air bersih pada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh PDAM khususnya air bersih pedesaan dengan memanfaatkan potensi yang ada pada masing-masing desa.
- g. Membangun dan merehabilitasi saluran irigasi pada daerah-daerah pertanian palawija/padi.

16. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Meneruskan rehabilitasi pembangunan Dermaga Rambang
- b. Melanjutkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinang
- c. Pengembangan Pelabuhan Tumbang Rungan
- d. Membangun tower telekomunikasi di daerah yang belum terjangkau jaringan TELKOMSEL
- e. Perluasan jangkauan siaran TV dan Radio
- f. Peningkatan pembangunan jaringan transportasi yang diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang andal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu dalam rangka terwujudnya transportasi yang aman dan lancar dengan biaya yang terjangkau oleh pengguna jasa.
- g. Peningkatan kebijakan yang berkaitan dengan meningkatnya sumber daya manusia sehingga terwujud baik keandalan pelayanan maupun antar dan inter moda transportasi yang disesuaikan dengan

perkembangan ekonomi, teknologi, tata ruang dan lingkungan hidup daerah Kota Palangka Raya.

- h. Peningkatan peran serta pihak swasta dan koperasi dalam penyelenggaraan transportasi perlu didorong dan digalakkan melalui penciptaan iklim yang menumbuhkan kompetisi yang sehat dan saling menghidupi diantara sesama pengusaha transportasi.
- i. Peningkatan pelayanan penumpang dalam kota, angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan antar kota antar provinsi melalui pelayanan terminal angkutan penumpang umum.
- j. Peningkatan perkembangan jaringan transportasi perkotaan dengan menyiapkan prasarana dan sarana transportasi yang memadai sesuai dan selaras dengan kemajuan dan permintaan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang tetap, aman, lancar dan nyaman serta selamat sampai tujuan.

17. DINAS TATA KOTA, BANGUNAN DAN PERTAMANAN

- a. Penyusunan dan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palangka raya
- b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada kawasan pusat kota, kawasan cepat tumbuh dan kawasan khusus lainnya serta penyiapan peraturan daerah pendukungnya
- c. Perencanaan pengembangan kawasan koridor jalan lingkar luar dan lingkar dalam kota Palangka Raya
- d. Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) kawasan tepian sungai kahayan
- e. Peningkatan pelayanan informasi tata ruang melalui penyediaan peta dan database tata ruang, prasarana dan utilitas perkotaan
- f. Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan rencana tata ruang melalui pengaturan insentif/disinsentif serta optimalisasi perjanjian
- g. Penyusunan peraturan penataan bangunan, reklame dan tempat usaha serta peraturan pendukung lainnya
- h. Peningkatan pengawasan dan penerapan law enforcement pemanfaatan ruang secara efektif
- i. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan

- j. Pengembangan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum yang memadai dan terpelihara
- k. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pengembangan kapasitas SDM petugas pemadam kebakaran Kota Palangka Raya
- l. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran melalui pembinaan pemadam kebakaran swakarsa Kota Palangka Raya
- m. Peningkatan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau kota melalui pembangunan efektivitas pemeliharaan taman-taman kota, hutan kota serta ruang terbuka hijau kota lainnya
- n. Optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan taman-taman kota melalui penyediaan lokasi pembibitan (nursery) dan pengolahan pupuk (termasuk pupuk organik)
- o. Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan (PJU dan utilitas perkotaan) yang sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan masyarakat melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan PJU dan utilitas perkotaan
- p. Mendorong keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan utilitas perkotaan

18. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM
- b. Peningkatan penataan lingkungan
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH (komunikasi, informasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat).
- d. Peningkatan kapasitas dan mekanisme pendanaan lingkungan
- e. Perencanaan lingkungan dan penataan ruang.
- f. Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- g. Perlindungan dan konservasi SDA.
- h. Pengelolaan ruang evakuasi bencana LH
- i. Pengelolaan ruang terbuka hijau
- j. Pengembangan kinerja pengelolaan limbah dan persampahan

- k. Peningkatan kapasitas kinerja dan pengendalian polusi
- l. Peningkatan kapasitas dan peningkatan pencemaran air.
- m. Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
- n. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- o. Pengendalian dampak perubahan iklim LH
- p. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
- q. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

19. DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN

- a. Sektor pengelolaan sampah
 - Meningkatkan prasarana sarana perwadhahan sampah di lingkungan pemukiman
 - Meningkatkan prasarana sarana pengangkutan sampah di TPS ke TPA
 - Meningkatkan prasarana sarana pengelolaan sampah di TPA
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah melalui 3R
- b. Sektor sarana dan prasarana pasar
 - Peningkatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 - Peningkatan pembinaan pasar tradisional dan pasar modern
 - Peningkatan sarana prasarana pasar tradisional dan pasar modern
 - Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pasar
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pasar
- c. Sektor pengelolaan limbah
 - Peningkatan sarana prasarana air limbah
 - Peningkatan gerakan 3R
 - Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - Pengembangan pengomposan
 - Peningkatan WC komunal di masyarakat.

20. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- a. Terciptanya sistem dan kebijakan dalam rangka administrasi kependudukan untuk mengakomodasi hak penduduk dan perlindungan sosial
- b. Terciptanya infrastruktur, perangkat dan jaringan SIAK dengan dukungan komitmen berbagai pihak
- c. Terciptanya kapasitas SDM dan kelembagaan
- d. Menjadikan faktor penduduk sebagai subyek dan obyek pelaksanaan administrasi kependudukan melalui registrasi yang akurat
- e. Terciptanya system administrasi dan layanan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik

21. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- a. Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban.
- b. Sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- c. Terjaganya aset daerah dan pejabat daerah
- d. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan anggota satpol PP.
- e. Peningkatan kuantitas anggota Satpol PP.
- f. Peningkatan kuantitas anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- g. Pengembangan / Peningkatan kualitas Sumber Daya anggota Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui studi banding, pelatihan, diklat dan lain-lain.
- h. Pembinaan, pengelolaan dan pengawasan pedagang kaki lima.
- i. Tersedianya lokasi pasar yang representatif.
- j. Terciptanya suasana berbelanja yang aman dan nyaman.
- k. Meningkatnya penanganan pelayanan pengaduan masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban umum

22. DINAS SOSIAL

- a. Perluasan jangkauan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial fakir miskin, lanjut usia terlantar, anak dan balita

terlantar, penyandang cacat, tuna sosial, korban tindak kekerasan dan eks trauma, orang terlantar.

- b. Peningkatan sistem informasi usaha kesejahteraan sosial
- c. Peningkatan mutu penanganan bencana dan pelayanan korban bencana
- d. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan handal
- e. Peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia
- f. Peningkatan mutu hasil rehabilitasi sosial penyandang cacat, anak nakal, tuna susila, korban penyalahgunaan napza, korban tindak kekerasan dan eks-trauma melalui Loka Bina Karya (LBK)
- g. Peningkatan usaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat melalui pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial masyarakat (karang taruna, PSM/TKSM kelompok-kelompok swadaya masyarakat, organisasi/lembaga/yayasan kesejahteraan sosial).
- h. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial.
- i. Penumbuhan kemitraan dengan dunia usaha dalam peningkatan usaha kesejahteraan sosial.
- j. Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan setiap umat beragama.
- k. Peningkatan kerukunan inter, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.

23. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

- a. Terbinanya peningkatan kualitas melalui bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial politik dan hukum
- b. Terbinanya peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya.
- c. Terbinanya kebijakan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan anak terutama di bidang pendidikan, kesehatan sosial, hukum dan ketenagakerjaan.
- d. Terbinanya kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) dan perlindungan anak di kota palangka Raya

- e. Peningkatan perencanaan, pemantauan evaluasi PUG dan PUA di Kota Palangka Raya
- f. Peningkatan SDM PLKB (LDU)
- g. Pembinaan kesertaan ber KB
- h. Promosi program KB tingkat Kota
- i. Promosi,advokasi, sosialisasi dan koordinasi PIK KRR Tingkat Kota Palangka Raya
- j. Pembinaan program KRR
- k. Pelaksanaan pendataan kelompok UPPKS
- l. Pemberian bantuan bagi kelompok UPPKS
- m. Pendataan kelompok IMP,BKB, BKR
- n. Pelaksanaan magang bagi kelompok dan pembina UPPKS
- o. Pembinaan kelompok IMP,BKB, BKR
- p. Terlaksanakan pemutakhiran data keluarga

24. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Peningkatan peranan LKK, RT/RW dan Mantir Adat dalam proses pembangunan kelurahan.
- b. Penyiapan fasilitas pendukung peran LKK, RT/RW dan Mantir Adat dalam proses pembangunan kelurahan.
- c. Identifikasi dan penataan P2W-KSS (Program Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga Sehat dan Sejahtera).
- d. Identifikasi dan penataan POSYANDU serta uji coba Sistem Informasi Posyandu (SIP).
- e. Identifikasi dan penataan nilai-nilai budaya dan lembaga adat serta sosial budaya masyarakat.
- f. Identifikasi dan penataan pengembangan pembangunan partisipatif melalui pemasyarakatan gotong royong masyarakat, penataan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Lomba Kelurahan, Musrenbang dan Program Padat Karya Produktif.
- g. Pembinaan dan stimulasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
- h. Identifikasi dan penataan peran masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular.
- i. Pengembangan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.
- j. Penataan Lembaga Kemasyarakatan

- k. Penataan sistem pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan
- l. Identifikasi dan penataan penataan dan pemantapan pelatihan ketrampilan masyarakat.
- m. Identifikasi dan penataan pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka pembukaan lahan tidur d pedesaan.
- n. Identifikasi dan penataan pengelolaan dan pembangunan prasarana dan sarana skala kecil di pedesaan
- o. Pembentukan dan pembinaan posyantekdes di tiap kecamatan.
- p. Pengkajian pelatihan/terapan/Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat desa
- q. Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D).
- r. Peningkatan keberdayaan keluarga miskin melalui peningkatan pendapatan.
- s. Pemanfaatan Data Base Usaha Ekonomi Masyarakat (Potensi Sumber daya Manusia dan Usaha).
- t. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro pada Kelurahan.
- u. Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro dan usaha kecil.
- v. fasilitasi pembentukan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan penyediaan modal awal
- w. Fasilitasi akses keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro dan usaha kecil
- y. Pembinaan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro dan usaha kecil
- z. Fasilitasi pembentukan BUMDes pada Kelurahan
- aa. Fasilitai pembentukan pasar desa/kelurahan

25. BADAN KETAHANAN PANGAN

- a. Tersedianya bahan pangan dan distribusi untuk mayarakat yang aman
- b. Percepatan panganekaragaman pangan dan giizi yang aman untuk dikonsumsi sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH)
- c. Terselenggaranya kegiatan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat petani

- d. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumberdaya petugas teknis dan petani
- e. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluh serta kelembagaan petani

26. KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;
- e. Program Pengelolaan Arsip Daerah;
- f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi / Data dan Dokumentasi;
- g. Program Pembangunan Kantor Perpustakaan;
- h. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Pada 30 Kelurahan dan Perpustakaan Umum Kota Palangka Raya;

27. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

- a. Pembuatan data base perijinan melalui Sistem Aplikasi Teknologi Informasi
- b. Melanjut Program Penggunaan Teknologi Informasi untuk seluruh mekanis mulai dari pendaftaran Ijin, penerbitan ijin, penetapan perhitungan pajak/retribusi, pembukuan dan pelaporan (akunting) untuk seluruh penerimaan.
- c. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia menggunakan Teknologi Informasi

2). RPJM ke-2 (2014 – 2018)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kota Palangka Raya di segala bidang dengan *menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat terutama mendorong usaha dalam bidang jasa supaya dapat berkelanjutan. Seiring dengan itu, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel semakin meningkat yang ditandai dengan*

terpenuhinya standar pelayanan minimal di semua tingkatan pemerintah di Kota Palangka Raya.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial;

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya air.

Secara umum program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan menjadi tahapan dan skala prioritas agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah tahap ke-2 tahun 2014-2018 adalah :

1. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- a. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil didasarkan prestasi kerja, professional dan memiliki kompetensi ke depan.
- b. Menyusun dan mengembangkan sistem karir yang dititikberatkan pada prestasi kerja.

- c. Penyusunan peta jabatan, kompetensi jabatan dan jumlah pegawai yang mengisi jabatan sesuai beban kerja
 - d. Peningkatan efisiensi, disiplin dan kinerja aparatur dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pegawai
2. DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- a. Menggali dan mengembangkan sumber keuangan daerah melalui pajak dan retribusi daerah dengan jalan intensifikasi maupun diversifikasi.
 - b. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penerimaan dan pengeluaran keuangan maupun belanja daerah
 - c. Pengadministrasian dan pengendalian yang efektif dan efisien terhadap asset daerah..
 - d. Menetapkan sistem, dan pola manajemen terbuka dalam pelayanan.
3. BAPPEDA
- a. Koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Pusat data perencanaan dan online;
 - c. Publikasi dan buletin penelitian dan pengembangan;
 - d. Tersedianya tenaga peneliti (jabatan fungsional);
 - e. Peningkatan Tim Koordinasi Tata Ruang Daerah;
 - f. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja;
 - g. Peningkatan penanaman modal dalam negeri dan asing
4. INSPEKTORAT KOTA
- a. Melanjutkan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut
 - b. Melanjutkan peningkatan keterampilan dan keahlian aparatur dalam pelaksanaan tugas pengawasan
 - c. Menugaskan secara penuh pejabat fungsional melaksanakan tugas pengawasan
 - d. Melanjutkan dan meningkatkan pelayanan publik berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat
 - e. Melanjutkan pelaksanaan review atas laporan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya
 - f. Melanjutkan evaluasi LAKIP bagi Pemerintah Kota Palangka Raya

- g. Melanjutkan rekrutmen SDM pengawasan berbasis akuntansi dan disiplin lain yang relevan
- h. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal
- i. Melanjutkan dukungan terhadap tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan KKN
- j. Melaksanakan gelar pengawasan tingkat Kota Palangka Raya
- k. Melanjutkan peningkatan kerjasama baik antar sesama (Aparat pengawasan intern pemerintah) maupun dengan Aparat Pengawasan Eksternal (BPK)
- l. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang

5. KESBANGLINMAS

- a. Pemberdayaan kelembagaan dalam organisasi politik, organisasi masa dalam ikut meningkatkan pembangunan di daerah dan bernegara.
- b. Terjalinnnya hubungan harmonis kehidupan masyarakat dan keagamaan dengan toleransi.

6. SEKRETARIAT DPRD

- a. Peningkatan kualitas pelayanan tertib administrasi dan keuangan anggota DPRD Kota Palangka Raya;
- b. Meningkatkan Kualitas Pengembangan SDM Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan Aparatur Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya;
- c. Meningkatkan Kinerja Anggota Dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan membantu proses penyelesaian;
- d. Meningkatkan peran serta sebagai mediator yang menjembatani kepentingan antara eksekutif dan legislatif;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana;
- f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara DPRD seluruh Indonesia;

7. DINAS PERTANIAN

- a. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, pengembangan diversifikasi produk dan konsumsi pangan, pemantapan distribusi produk (perwilayahan komoditas unggulan).
- b. Pengembangan infrastruktur pertanian.
- c. Peningkatan penerapan teknologi spesifik lokal.

- d. Swasembada sayuran dataran rendah
- e. Pengembangan kelembagaan UPJA dan KUPJA
- f. Penggalakan sistem pertanian berbasis konservasi.
- g. Pengembangan sistem pertanian organik dan LH
- h. Pengembangan kapasitas SDM petani dan aparatur.
- i. Pengembangan penyediaan pangan yang ASUH (80%)
- j. Pengembangan kelembagaan pembiayaan pertanian dan kerjasama dengan lembaga keuangan serta kemitraan.

8. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- a. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung, produksi dan jasa lingkungan untuk mencapai keseimbangan ekologi, sosial, budaya dan ekonomi yang lestari.
- b. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), sumberdaya manusia yang profesional dan sarana/prasarana
- c. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam
- d. Peningkatan pemanfaatan lahan yang potensial untuk usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

9. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- a. Pengembangan teknologi pertambangan yang tepat guna dan berdaya guna
- b. Survey/geologi/pengembangan data potensi tambang
- c. Pengembangan energi alternatif berupa biogas
- d. Pengembangan energi alternatif berupa PLTS
- e. Pengembangan energi alternatif berupa biosel
- f. Pengembangan/penambahan jaringan listrik dan daya listrik
- g. Pengembangan/peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur
- h. Peningkatan pengawasan dan penertiban usaha pertambangan dan energi
- i. Pengembangan sarana dan prasarana

- j. Penanggulangan kerusakan lingkungan kawasan tambang
- k. Penanggulangan, pengawasan dan penertiban illegal minino
- l. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- m. Peningkatan pemanfaatan potensi tambang

10. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM
- b. Peningkatan sistim pendukung usaha Koperasi dan UMKM
- c. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM
- d. Pengembangan promosi produk Koperasi dan UMKM
- e. Advokasi produk UMKM
- f. Meningkatkan produktivitas Industri Pengolahan komoditi unggulan daerah melalui pembinaan OVOP dan Kompetensi inti daerah.
- g. Meningkatkan produktivitas produksi makan ringan tradisional (cirri khas daerah) serta kualitas pengemasan dan penggunaan merk.
- h. Meningkatkan produktivitas produksi kerajinan dan barang seni berbasis warisan budaya dan penggunaan kemasan siap pakai (standar) produk kerajinan.
- i. Peningkatan jumlah unit usaha industri kecil menjadi industri menengah.
- j. Peningkatan daya saing produk IKM di pasar nasional
- k. Peningkatan mutu, inovasi teknologi dan desain produk
- l. Peningkatan promosi dan pemasaran produk IKM
- m. Peningkatan kompetensi SDM
- n. Menjamin ketersediaan bahan baku.
- o. Peningkatan pelayanan prima di bidang perdagangan
- p. Memberikan informasi baik local, regional dan global secara berkesinambungan terhadap dunia usaha
- q. Meningkatkan pengembangan produk unggulan daerah, preferensi terhadap pengusaha pengguna produksi dalam negeri / daerah dan promosi.
- r. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
- s. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan
- t. Peningkatan kerjasama perdagangan Internasional.
- u. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- v. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
- w. Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha

11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- a. Pengembangan sistem pelatihan kerja daerah yang mengacu pada kebutuhan dunia kerja Competency Based Training (CBT)
- b. Mendorong penciptaan lapangan kerja formal yang seluas-luasnya
- c. Mendorong tercapainya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat
- d. Pengembangan strategi dan program pengamanan substansi teknis ketenagakerjaan
- e. Pengelolaan lingkungan kawasan transmigrasi

12. DINAS KESEHATAN

Sasaran : Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat

- a. Meningkatkan perhatian khusus pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak, masyarakat miskin, masyarakat terpencil, penanggulangan penyakit & gizi buruk, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil.
- b. Revitalisasi puskesmas guna meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan melaksanakan upaya kesehatan perorangan secara serasi dan sinergis sesuai dengan perkembangan IPTEK kesehatan
- c. Meningkatkan penurunan angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular sesuai dengan target MDGs (Millenium Development Goals).
- d. Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, dan upaya peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar
- e. Sustainability pemenuhan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan bagi seluruh masyarakat rentan dan keluarga miskin, serta meningkatkan upaya kemitraan pemerintah dan swasta
- f. Meningkatkan pembelanjaan kesehatan mengarah pada upaya pencegahan dan promosi untuk mengatasi masalah kesehatan yang utama

- g. Meningkatkan pengawasan obat, sarama dan perbekalan kesehatan
- h. Meningkatkan sinergisme antara pembinaan, pengawasan, perencanaan, pendayagunaan dan pengadaan SDM
- i. Mengembangkan sistem administrasi kesehatan dalam mendukung sinergisme antara upaya-upaya pokok pembangunan kesehatan

13. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- a. APM dan APK PAUD tuntas Madya
- b. APM dan APK pendidikan dasar tuntas paripurna
- c. APM dan APK pendidikan menengah paripurna
- d. Peningkatan kulatas pendidikan dasar dan menengah, penuntasan wajib belajar 9 tahun dan menuju wajib belajar 12 tahun
- e. Peningkatan kualitas akademik pendidik dan tenaga pendidik
- f. Penuntasan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pemuda dan olah raga.

14. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Target kunjungan wisatawan 350 orang dengan program :

- a. Pengembangan destinasi disertai dengan diversifikasi tujuan wisata (wisata budya, religi, kuliner dan sebagainya)
- b. Pengembangan usaha masyarakat
- c. Promosi pariwisata dengan pencitraan
- d. Pembangunan dan revitalisasi sarana/prasarana kebudayaan dan kesenian

15. DINAS PEKERJAAN UMUM

- a. Meningkatkan kemampuan pelayanan jalan-jalan penghubung pada daerah terisolir dari kondisi fungsional menjadi mantap
- b. Mempertahankan kondisi jalan mantap yang ada melalui Program Pemeliharaan Berkala Jalan dan Pemeliharaan rutin jalan
- c. Meningkatkan kemampuan pelayanan jalan yang sudah ada melalui perbaikan alinyemen, pelebaran dan melapis ulang permukaan dengan konstruksi yang lebih baik.
- d. Memperluas pelayanan jaringan drainase khususnya pada daerah-daerah permukiman
- e. Mempertahankan kondisi saluran yang sudah baik agar tetap berfungsi melalui pemeliharaan rutin.

- f. Mengembangkan program penyediaan dan peningkatan kualitas pengolahan Air Bersih Pedesaan.
- g. Mengembangkan perluasan saluran irigasi untuk lahan-lahan potensial pertanian sesuai permintaan masyarakat.

16. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Perluasan pembangunan Dermaga Bereng Bengkel
- b. Pemasangan rambu-rambu sungai di 3 (tiga) daerah aliran Sungai Kahayan, Rungan dan Sabangau
- c. Melanjutkan pembangunan dan pemasangan tower telkomsel
- d. Perluasan jangkauan siaran TV dan Radio
- e. Pengadaan kapal untuk angkutan anak sekolah.
- f. Perkembangan di wilayah perkotaan untuk transportasi yang tetap, lancar, aman, nyaman dan efisien agar memberikab daya tarik bagi pemakai jasa transportasi serta dapat dihindari kemacetan dan gangguan lalu lintas.
- g. Pengembangan jaringan transportasi jalan yang diarahkan secara terpadu antara transportasi jalan raya, sungai, danau dan penyeberangan melalui pembangunan sarana dan prasarana dengan meningkatkan manajemen dan pelayanan serta pembinaan pemakai jalan dan kejelasan informasi agar dapat memacu pembangunan di semua sektor.
- h. Peningkatan pengembangan jaringan transportasi perlu ditambahkembangkan dan diserasikan dengan perkembangan transportasi jalan raya antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan dipusat pertumbuhan, pusat produksi, dan menghubungkan antara pusat produksi dengan daerah pemasaran.
- i. Menjabarkan pelaksanaan pengembangan sektor angkutan kota yang terpadu untuk dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan.
- j. Mewujudkan sistem pentarifan yang dapat menjamin dan mendorong penggunaan segenap sarana dan prasarana angkutan kota semaksimal dan sefektif mungkin dengan mempertimbangkan

kepentingan dan kemampuan masyarakat dan kelangsungan penyelenggaraan transportasi jalan raya.

17. DINAS TATA KOTA, BANGUNAN DAN PERTAMANAN

- a. Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palangka raya
- b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada kawasan pusat kota, kawasan cepat tumbuh dan kawasan khusus lainnya serta penyiapan peraturan daerah pendukungnya
- c. Perencanaan pengembangan kawasan koridor jalan lingkar luar dan lingkar dalam kota Palangka Raya
- d. Penataan kawasan tepian sungai kahayan
- e. Peningkatan pelayanan informasi tata ruang melalui penyediaan peta dan database tata ruang, prasarana dan utilitas perkotaan
- f. Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan rencana tata ruang melalui pengaturan insentif/disinsentif serta optimalisasi perjanjian
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan penataan bangunan, reklame dan tempat usaha serta peraturan pendukungnya
- h. Peningkatan pengawasan dan pnerapan *law enforcement* pemanfaatan ruang secara efektif
- i. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan
- j. Pengembangan sarana dan prasaran tempat pemakaman umum yang memadai dan terpelihara
- k. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pengembangan kapasitas SDM petugas pemadam kebakaran Kota Palangka Raya
- l. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran melalui pembinaan pemadam kebakaran swakarsa Kota Palangka Raya
- m. Peningkatan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau kota melalui pembangunan efektivitas pemeliharaan taman-taman kota, hutan kota serta ruang terbuka hijau kota lainnya

- n. Optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan taman-taman kota melalui penyediaan lokasi pembibitan (nursery) dan pengolahan pupuk (termasuk pupuk organik)
- o. Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan (PJU dan utilitas perkotaan) yang sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan masyarakat melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan PJU dan utilitas perkotaan
- p. Mendorong keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan utilitas perkotaan

18. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM
- b. Peningkatan penataan lingkungan
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH (komunikasi, informasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat).
- d. Peningkatan kapasitas dan mekanisme pendanaan lingkungan
- e. Perencanaan lingkungan dan penataan ruang.
- f. Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- g. Perlindungan dan konservasi SDA.
- h. Pengelolaan ruang evakuasi bencana LH
- i. Pengelolaan ruang terbuka hijau. (Kantor/Sekolah Peduli Lingkungan 80%)
- j. Pengembangan kinerja pengelolaan limbah dan persampahan
- k. Peningkatan kapasitas kinerja dan pengendalian polusi. (Pengujian Emisi/polusi udara 80%)
- l. Peningkatan kapasitas dan peningkatan pencemaran air. (Pengujian limbah pembuangan air 60%)
- m. Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
- n. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- o. Pengendalian dampak perubahan iklim LH
- p. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. (50%)
- q. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

19. DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN

- a. Sektor pengelolaan sampah

- Memantapkan perwadahan sampah di lingkungan pemukiman
 - Memantapkan pengangkutan sampah di TPS ke TPA
 - Pengelolaan sampah di TPA dengan system control land fill
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah melalui 3R
 - Penataan sarana prasarana 3R di lingkungan pemukiman
- b. Sektor sarana dan prasarana pasar
- Tertatanya pasar tradisional dan pasar modern sesuai dengan perkembangan kota
 - sarana prasarana pasar tradisional dan pasar modern telah sesuai dengan standar
 - Lingkungan pasar telah sesuai dengan Standard sanitasi lingkungan
 - Sumberdaya manusia pengelolaan pasar telah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
- c. Sektor pengelolaan limbah
- Pemantapan pengelolaan limbah limbah
 - Gerakan 3R telah membudaya di masyarakat
 - Pemanfaatan tempat pengolahan sampah terpadu
 - Kualitas sumber daya manusia telah memenuhi kualifikasi
 - WC komunal telah menjadi kebutuhan masyarakat.
 - Kualitas kompos yang dihasilkan dari gerakan 3 R telah memenuhi standart

20. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- a. Terbangunnya sistem dan kebijakan administrasi kependudukan dengan dukungan perangkat SIAK guna mengakomodasi hak penduduk dan perlindungan sosial
- b. Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan dalam sistem administrasi dan layanan sehingga mendukung pemerintahan yang baik
- c. Terbangunnya partisipasi penduduk yang mendukung registrasi yang akurat dalam pelaksanaan sistem administrasi kependudukan.

21. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- a. Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban.
- b. Sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- c. Terjaganya aset daerah dan pejabat daerah
- d. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan anggota satpol PP.
- e. Peningkatan kuantitas anggota Satpol PP.
- f. Peningkatan kuantitas anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- g. Pengembangan / Peningkatan kualitas Sumber Daya anggota Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui studi banding, pelatihan, diklat dan lain-lain.
- h. Pembinaan, pengelolaan dan pengawasan pedagang kaki lima.
- i. Tersedianya lokasi pasar yang representatif.
- j. Terciptanya suasana berbelanja yang aman dan nyaman.
- k. Meningkatnya penanganan pelayanan pengaduan masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban umum

22. DINAS SOSIAL

- a. Peningkatan jangkauan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial fakir miskin, lanjut usia terlantar, anak dan balita terlantar, penyandang cacat, tuna sosial, korban tindak kekerasan dan eks trauma, orang terlantar.
- b. Peningkatan sistem informasi usaha kesejahteraan sosial
- c. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pelayanan korban bencana
- d. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan handal
- e. Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia
- f. Peningkatan peran dan fungsi Loka Bina Karya (LBK) kualitas hasil rehabilitasi sosial penyandang cacat, anak nakal, tuna susila, korban penyalahgunaan napza, korban tindak kekerasan dan eks-trauma.

- g. Pemantapan dan kemandirian potensi dan sumber kesejahteraan sosial masyarakat (karang taruna, PSM/TKSM kelompok-kelompok swadaya masyarakat, organisasi/lembaga/ yayasan kesejahteraan sosial) dalam usaha kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat.
- h. Peningkatan peran dunia usaha dalam usaha kesejahteraan sosial
- i. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial.
- j. Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan setiap umat beragama.
- k. Peningkatan kerukunan inter, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.

23. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

- a. Terbinanya peningkatan kualitas melalui bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial politik dan hukum
- b. Terbinanya peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya.
- c. Terbinanya kebijakan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan anak terutama di bidang pendidikan, kesehatan sosial, hukum dan ketenagakerjaan.
- d. Terbinanya kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) dan perlindungan anak di kota Palangka Raya
- e. Peningkatan perencanaan, pemantauan evaluasi PUG dan PUA di Kota Palangka Raya
- f. Promosi KEI masalah Gender dan promosi kedokteran Bidan Keluarga
- g. Kegiatan KEI-KB melalui kegiatan kelompok
- h. Pengembangan KRR Tingkat Kota
- i. Peningkatan peran serta tokoh agama dalam program KRR
- j. Forum pertemuan Pokja KPR tingkat Kota
- k. Mengembangkan kelompok UUPKS
- l. Meningkatkan keberlangsungan usaha kelompok UPPKS
- m. Mengembangkan kelompok IMP, BKB, BKR dan BKL

- n. Meningkatkan kualitas para pengelola, pelaksana dan kader IMP, BKB, BKR dan BKL
- o. Tersedianya data keluarga

24. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA

- a. Pemantapan peranan LKK, RT/RW dan Mantir Adat dalam proses pembangunan kelurahan.
- b. Pemantapan ketersediaan fasilitas pendukung peran LKK, RT/RW dan Mantir Adat dalam proses pembangunan kelurahan.
- c. Pembinaan dan pengembangan P2W-KSS (Program Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga Sehat dan Sejahtera).
- d. Pembinaan dan pengembangan peran POSYANDU serta uji coba Sistem Informasi Posyandu (SIP).
- e. Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya dan lembaga adat serta sosial budaya masyarakat.
- f. Pembinaan dan pengembangan pola pembangunan partisipatif melalui pemasyarakatan gotong royong masyarakat, penataan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Lomba Kelurahan, Musrenbang dan Program Padat Karya Produktif.
- g. Pembinaan dan memasyarakatkan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
- h. Pembinaan dan pengembangan peran masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular.
- i. Pengembangan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.
- j. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
- k. Pembinaan dan pengembangan sistem aplikasi pendataan dan pendayagunaan Data Profil Kelurahan
- l. Pembinaan dan pengembangan pelatihan ketrampilan masyarakat.
- m. Pemanfaatan dan pembukaan lokasi lahan tidur untuk tanaman produktif.
- n. Pembangunan dan pembuatan sarana jalan desa dan sarana lainnya dengan sistem padat karya
- o. Pembinaan dan pengembangan posyantekdes di tiap kecamatan sebagai sarana informasi pembangunan
- p. pelaksanaan /Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat desa

- q. meningkatkan kKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- r. Peningkatan keberdayaan keluarga miskin melalui peningkatan pendapatan keluarga miskin dengan melakukan diversifikasi usaha keluarga / masyarakat.
- s. Pemutakhiran data usaha ekonomi keluarga / masyarakat
- t. Pembinaan usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP)
- u. meningkatkan koordinasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro dan usaha kecil.
- v. Pembinaan BUMDes pada Kelurahan
- w. Fasilitasi pembentukan pasar desa/kelurahan

25. BADAN KETAHANAN PANGAN

- a. Peningkatan penyelenggaraan ketersediaan bahan pangan dan sistem distribusi yang aman untuk masyarakat
- b. Peningkatan konsumsi pangan dan gizi masyarakat sesuai dengan Pola Pangan Harapan
- c. Penyelenggaraan penyuluh yang lebih profesioanal sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Tersedianya sumberdaya penyuluh dan petani yang lebih profesioanal seseuai dengan kebutuhan dan berdaya saing
- e. Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh/kelembagaan petani

26. KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;
- e. Program Pengelolaan Arsip Daerah;
- f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi / Data dan Dokumentasi;
- g. Program Operasional Perpustakaan Keliling untuk jalur sungai;
- h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Untuk PM2L Binaan, Pengadaan Lemari Arsip Pada 6 Kelurahan, Tempat Buku – Buku Bantuan dari Pemerintah Provinsi;

27. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

- a. Pembuatan jaringan teknologi informasi sampai ke dinas-dinas yang terkait dengan pengelolaan perizinan.
- b. Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- c. Peningkatan sarana dan prasarana kantor
- d. Penyempurnaan ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perizinan usaha
- e. Penyempurnaan pola/sistem pelayanan yang disesuaikan dengan sistem Program Aplikasi Informasi Teknologi

3). RPJM ke-3 (2018 – 2022)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang *dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas dan kekhasan budaya daerah.*

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kota Palangka Raya.

Daya saing perekonomian daerah semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya

pasokan tenaga listrik yang efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai masih sangat perlu untuk tetap menjaga jati diri dengan melakukan revitalisasi budaya sehingga masyarakat tetap hidup rukun dan damai dengan memegang teguh falsafah hidup huma betang.

Secara umum program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan menjadi tahapan dan skala prioritas agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah tahap ke-3 tahun 2019-2023 adalah :

1. **BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
 - a. Penyusunan dan mengembangkan tolok ukur kinerja aparatur
 - b. Peningkatan efektifitas waskat, pengawasan masyarakat dan sistem akuntabilitas kinerja yang mampu memperkecil peluang KKN dan menciptakan pelayanan publik yang prima.
 - c. Memantau, mengevaluasi dan menilai kinerja aparatur dengan unit kerja terkait
2. **DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
 - a. Menggali dan mengembangkan sumber keuangan daerah melalui pajak dan retribusi daerah dengan jalan intensifikasi maupun diversifikasi.
 - b. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penerimaan dan pengeluaran keuangan maupun belanja daerah
 - c. Pengadministrasian dan pengendalian terhadap aset daerah secara optimal
 - d. Menetapkan dan mengembangkan sistem, dan pola manajemen terbuka dalam pelayanan.
3. **BAPPEDA**
 - i. Koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - j. Meningkatkan basis data perencanaan dan online;
 - k. Pemantapan dan penguatan penelitian dan pengembangan;

- l. Adopsi dan penerapan inovasi industri dan teknologi;
 - m. Peningkatan Tim Koordinasi Tata Ruang Daerah;
 - n. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja;
 - o. Peningkatan penanaman modal dalam negeri dan asing
4. INSPEKTORAT KOTA
- a. Melanjutkan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut
 - b. Melanjutkan peningkatan keterampilan dan keahlian aparatur dalam pelaksanaan tugas pengawasan
 - c. Menugaskan secara penuh pejabat fungsional melaksanakan tugas pengawasan
 - d. Melanjutkan dan meningkatkan pelayanan publik berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat
 - e. Melanjutkan pelaksanaan review atas laporan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya
 - f. Melanjutkan evaluasi LAKIP bagi Pemerintah Kota Palangka Raya
 - g. Melanjutkan rekrutmen SDM pengawasan berbasis akuntansi dan disiplin lain yang relevan
 - h. Melanjutkan dukungan terhadap tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan KKN
 - i. Melaksanakan gelar pengawasan tingkat Kota Palangka Raya
 - j. Melanjutkan peningkatan kerjasama baik antar sesama (Aparat pengawasan intern pemerintah) maupun dengan Aparat Pengawasan Eksternal (BPK)
 - k. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang
5. KESBANGLINMAS
- a. Mantapnya kehidupan masyarakat dan keagamaan.
 - b. Penciptaan Stabilitas sosial dan politik
 - c. Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara.
6. SEKRETARIAT DPRD
- a. Peningkatan kualitas pelayanan tertib administrasi dan keuangan anggota DPRD Kota Palangka Raya;
 - b. Meningkatkan Kualitas Pengembangan SDM Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan Aparatur Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya;

- c. Meningkatkan Kinerja Anggota Dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan membantu proses penyelesaian;
- d. Meningkatkan peran serta sebagai mediator yang menjembatani kepentingan antara eksekutif dan legislatif;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana;
- f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara DPRD seluruh Indonesia;

7. DINAS PERTANIAN

- a. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, pengembangan diversifikasi produk dan konsumsi pangan, pemantapan distribusi produk (perwilayahan komoditas unggulan).
- b. Pengembangan infrastruktur pertanian.
- c. Peningkatan penerapan teknologi spesifik lokal.
- d. Pengembangan sistem pertanian organik dan LH
- e. Pengembangan kapasitas SDM petani dan aparatur.
- f. Pengembangan penyediaan pangan yang ASUH (90%)
- g. Pengembangan nilai tambah dan daya saing produk unggulan
- h. Penurunan import/pemasukan ternak sapi
- i. Penguatan organisasi dan jaringan tani, mendorong tumbuhnya LSM pertanian dan advokasi petani.

8. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- a. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung, produksi dan jasa lingkungan untuk mencapai keseimbangan ekologi, sosial, budaya dan ekonomi yang lestari.
- b. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), sumberdaya manusia yang profesional dan sarana/prasarana
- c. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam
- d. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

9. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- a. Pengembangan teknologi pertambangan yang tepat guna dan berdaya guna

- b. Survey/geologi/pengembangan data potensi tambang
 - c. Pengembangan energi alternatif berupa biogas
 - d. Pengembangan energi alternatif berupa PLTS
 - e. Pengembangan energi alternatif berupa biosel
 - f. Pengembangan/penambahan jaringan listrik dan daya listrik
 - g. Pengembangan/peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur
 - h. Peningkatan pengawasan dan penertiban usaha pertambangan dan energi
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana
 - j. Penanggulangan kerusakan lingkungan kawasan tambang
 - k. Penanggulangan, pengawasan dan penertiban illegal mining
 - l. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - m. Peningkatan pemanfaatan potensi tambang
10. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
- a. Kemandirian Koperasi
 - b. Pengembangan produk unggulan Koperasi dan UMKM
 - c. Peningkatan usaha bagi Koperasi dan UMKM yang berlisensi
 - d. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM
 - e. Peningkatan sistem pendukung usaha Koperasi dan UMKM
 - f. Pengembangan Koperasi mitra Perbankan
 - g. Advokasi produk UMKM
 - h. Melakukan diversifikasi produk Industri Pengolahan komoditi unggulan daerah melalui pembinaan OVOP dan Kompetensi inti daerah.
 - i. Melakukan diversifikasi produk-produk makan ringan berbasis potensi bahan baku daerah.
 - j. Melakukan Diversifikasi produk kerajinan dan barang seni berbasis warisan budaya.
 - k. Perkuatan IKM.
 - l. Meningkatkan penerapan SNI dan HAKI dan perluasan pasar
 - m. Modernisasi mesin peralatan dan proses produksi
 - n. Meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan teknologi industri pengolahan.
 - o. Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku.

- p. Peningkatan pelayanan prima di bidang perdagangan
- q. Memberikan informasi baik lokal, regional dan global secara berkesinambungan terhadap dunia usaha
- r. Meningkatkan pengembangan produk unggulan daerah, preferensi terhadap pengusaha pengguna produksi dalam negeri / daerah dan promosi.
- s. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
- t. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan
- u. Peningkatan kerjasama perdagangan Internasional
- v. Peningkatan dan pengembangan ekspor
- w. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- x. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
- y. Pembedayaan Konsumen dan Pelaku Usaha

11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- a. Pelatihan kerja yang produktivitas dan membangun kerjasama dengan pihak ketiga
- b. Terciptanya kesempatan kerja pada sektor formal dan informal melalui pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai bidangnya
- c. Meningkatnya hubungan industrial dan tenaga kerja
- d. Penegakan hukum ketenagakerjaan

12. DINAS KESEHATAN

Sasaran : Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mulai mantap

- a. Meningkatkan perhatian khusus terhadap upaya pelayanan pada golongan penduduk rentan (bayi, anak, ibu, usia, masyarakat pekerja sector informal, dan masyarakat miskin), dan meningkatkan pelayanan geriatri
- b. Meningkatkan penanggulangan pencemaran lingkungan, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan meningkatkan pengawasan pembangunan berwawasan kesehatan
- c. Meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan bagi kelompok rentan sesuai standar percapita, baik bersumber dari pemerintah maupun swasta / masyarakat

- d. Meningkatkan sistem pembelanjaan kesehatan bersumber dari pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat, secara efektif, efisien, transparan
- e. Memantapkan sistem administrasi dan implementasi sistem regulasi kesehatan (hukum dan perundangan), terhadap SDM, sarana pelayanan kesehatan dan institusi yankes , baik milik pemerintah dan swasta
- f. Jaminan ketersediaan, keamanan, dan mutu obat dan perbekalan kesehatan
- g. Optimalisasi sistem administrasi kesehatan dalam mendukung sinergisme antara upaya-upaya pokok pembangunan kesehatan

13. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- a. APM dan APK PAUD tuntas paripurna
- b. APM dan APK pendidikan dasar tuntas paripurna
- c. APM dan APK pendidikan menengah paripurna
- d. Peningkatan kulatas pendidikan dasar dan menengah, penuntasan wajib belajar 9 tahun dan menuju wajib belajar 12 tahun
- e. Peningkatan kualitas akademik pendidik dan tenaga pendidik
- f. Pencapaian/peningkatan prestasi olah raga skala regional dan nasional
- g. Pemantapan keberadaan sarana dan prasarana pendidikan, pemuda dan olah raga.

14. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Target kunjungan 750.000 orang dengan program :

- a. Pemeliharaan destinasi pariwisata unggulan dilanjutkan dengan diversifikasi atraksi wisata
- b. Promosi wisata yang intensif dengan pencitraan dan direct selling
- c. Pengembangan dan pementasan kegiatan kesenian dan kebudayaan
- d. Kemitraan antar daerah dan antar stake holder dalam pengembangan pariwisata
- e. Pengembangan usaha di bidang pariwisata

15. DINAS PEKERJAAN UMUM

- a. Melanjutkan pembangunan jaringan jalan pada kawasan-kawasan yang menjadi wilayah pembangunan Kota Palangka Raya
- b. Mempertahankan kondisi jalan mantap yang ada melalui Program Pemeliharaan Berkala Jalan dan Pemeliharaan rutin jalan
- c. Meningkatkan kemampuan pelayanan jalan yang sudah ada melalui perbaikan alinyemen, pelebaran dan melapis ulang permukaan dengan konstruksi yang lebih baik.
- d. Melanjutkan pembangunan drainase perkotaan seiring dengan pertumbuhan kota.
- e. Mempertahankan kondisi saluran yang sudah baik agar tetap berfungsi melalui pemeliharaan rutin.
- f. Melanjutkan Program Penyediaan Air Bersih Perdesaan dan pembuatan kelembagaan kelurahan
- g. Mengembangkan dan memelihara saluran irigasi pada daerah-daerah potensial seiring dengan pertumbuhan luas lahan

16. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Pengerukan kolam pelabuhan Dermaga Rambang
- b. Pengerukan kolam pelabuhan Dermaga Kereng Bangkirai
- b. Pengadaan rambu-rambu sungai
- c. Pengadaan kapal patroli sungai
- d. Mengarahkan tahapan pengembangan dengan meletakkan prioritas pada usaha peningkatan kualitas pelayanan angkutan kota dengan memperhatikan kepentingan pemakai jasa angkutan umum dan keseimbangan pengembangan yang terpadu antar sub-sub sektor prasarana dan sarana kota dan angkutan perintis.
- e. Meningkatkan angkutan kota yang lebih luas, tertib, aman, teratur, lancar dan efisien dengan biaya terjangkau oleh masyarakat diwilayah perkotaan dan pinggiran.
- f. Memperhatikan pengembangan agar penjualan sarana transportasi angkutan umum dan sarana angkutan lainnya di dalam usaha menyediakan sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman.

17. DINAS TATA KOTA, BANGUNAN DAN PERTAMANAN

- a. Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palangka Raya
- b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada kawasan pusat kota, kawasan cepat tumbuh dan kawasan khusus lainnya serta penyiapan peraturan daerah pendukungnya
- c. Peningkatan pelayanan informasi tata ruang melalui penyediaan peta dan database tata ruang, prasarana dan utilitas perkotaan
- d. Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan rencana tata ruang melalui pengaturan insentif/disinsentif serta optimalisasi perjanjian
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan penataan bangunan, reklame dan tempat usaha serta peraturan pendukungnya
- f. Peningkatan pengawasan dan penerapan *law enforcement* pemanfaatan ruang secara efektif
- g. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan
- h. Melanjutkan pengembangan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum yang memadai dan terpelihara
- i. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pengembangan kapasitas SDM petugas pemadam kebakaran Kota Palangka Raya
- j. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran melalui pembinaan pemadam kebakaran swakarsa Kota Palangka Raya
- k. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau kota melalui pembangunan efektivitas pemeliharaan taman-taman kota, hutan kota serta ruang terbuka hijau kota lainnya
- l. Optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan taman-taman kota melalui penyediaan lokasi pembibitan (nursery) dan pengolahan pupuk (termasuk pupuk organik)
- m. Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan (PJU dan utilitas perkotaan) yang sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan masyarakat melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan PJU dan utilitas perkotaan

- n. Mendorong keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan utilitas perkotaan

18. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM
- b. Peningkatan penataan lingkungan
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH (komunikasi, informasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat).
- d. Peningkatan kapasitas dan mekanisme pendanaan lingkungan
- e. Perencanaan lingkungan dan penataan ruang.
- f. Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- g. Perlindungan dan konservasi SDA.
- h. Pengelolaan ruang evakuasi bencana LH
- i. Pengelolaan ruang terbuka hijau. (Kantor/Sekolah Peduli Lingkungan 80%)
- j. Pengembangan kinerja pengelolaan limbah dan persampahan
- k. Peningkatan kapasitas kinerja dan pengendalian polusi. (Pengujian Emisi/polusi udara 80%)
- l. Peningkatan kapasitas dan peningkatan pencemaran air. (Pengujian limbah pembuangan air 70%)
- m. Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
- n. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- o. Pengendalian dampak perubahan iklim LH
- p. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. (60%)
- q. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

19. DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN

- a. Sektor pengelolaan sampah
 - Meningkatkan prasarana sarana perwadhahan sampah di lingkungan pemukiman
 - Meningkatkan prasarana sarana pengangkutan sampah di TPS ke TPA
 - Meningkatkan prasarana sarana pengelolaan sampah di TPA

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah melalui 3R
 - Penataan sarana prasarana 3R di lingkungan pemukiman
 - Peningkatan pemanfaatan produk 3R pada masyarakat
- b. Sektor sarana dan prasarana pasar
- Peningkatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 - Peningkatan pembinaan pasar tradisional dan pasar modern
 - Peningkatan sarana prasarana pasar tradisional dan pasar modern
 - Peningkatan sarana dan sanitasi lingkungan pasar
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - Peningkatan pengawasan dan pembinaan pasar tradisional dan pasar modern
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas pasar
- c. Sektor pengelolaan limbah
- Pengembangan kinerja sarana prasarana air limbah
 - Penggalakan gerakan 3R
 - Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - Pengembangan pengomposan
 - Peningkatan WC komunal di masyarakat.
 - Peningkatan kualitas pengomposan

20. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- a. Terkelolanya sistem administrasi kependudukan yang berbasis perangkat SIAK guna mendukung registrasi yang akurat dengan partisipasi aktif penduduk
- b. Terkelolanya kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

21. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- a. Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban.
- b. Sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- c. Terjaganya aset daerah dan pejabat daerah

- d. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan anggota satpol PP.
- e. Pengembangan / Peningkatan kualitas Sumber Daya anggota Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui studi banding, pelatihan, diklat dan lain-lain.
- f. Pembinaan, pengelolaan dan pengawasan pedagang kaki lima.
- g. Tersedianya lokasi pasar yang representatif.
- h. Terciptanya suasana berbelanja yang aman dan nyaman.
- i. Meningkatnya penanganan pelayanan pengaduan masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban umum

22. DINAS SOSIAL

- a. Peningkatan cakupan dan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial fakir miskin, lanjut usia terlantar, anak dan balita terlantar, penyandang cacat, tuna sosial, korban tindak kekerasan dan eks trauma, orang terlantar.
- b. Peningkatan peran dan fungsi LBK sebagai :
 - 1). Pusat pengembangan mutu hasil pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial
 - 2). Pusat sistem informasi usaha kesejahteraan sosial
 - 3). Pusat jaringan kemitraan potensi dan sumber kesejahteraan sosial masyarakat (karang taruna, PSM/TKSM kelompok-kelompok swadaya masyarakat, organisasi/lembaga/ yayasan kesejahteraan sosial) serta dunia usaha dalam usaha kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pelayanan korban bencana
- d. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan handal
- e. Pemantapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial
- f. Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan setiap umat beragama.
- g. Peningkatan kerukunan inter, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.

23. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

- a. Terbinanya peningkatan kualitas melalui aksi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial politik dan hukum

- b. Terbinanya peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya.
- c. Terbinanya kebijakan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan anak terutama di bidang pendidikan, kesehatan sosial, hukum dan ketenagakerjaan.
- d. Terbinanya kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) dan perlindungan anak di kota Palangka Raya
- e. Peningkatan perencanaan, pemantauan evaluasi PUG dan PUA di Kota Palangka Raya.
- f. Pembinaan kualitas pelayanan melalui Tim Jaga Mutu dan Medis Teknis
- g. Penyusunan panduan materi KEI Konseling KRR
- h. Pembinaan dan monitoring KRR tingkat kecamatan
- i. meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola /pengurus/anggota kelompok UPPKS dan pembina UPPKS
- j. Meningkatkan kualitas para pengelola, pelaksana dan kader IMP, BKB, BKR dan BKL
- k. Tersedianya data keluarga

24. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA

- a. Peningkatan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur pemerintahan kelurahan
- b. Peningkatan sumberdaya aparatur pemerintahan kelurahan
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2W-KSS (Program Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga Sehat dan Sejahtera).
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan POSYANDU serta uji coba Sistem Informasi Posyandu (SIP).
- e. Fasilitasi peran nilai-nilai budaya dan lembaga adat serta sosial budaya masyarakat.
- f. Fasilitasi dan evaluasi pembangunan partisipatif
- g. Fasilitasi dan evaluasi pembinaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
- h. Fasilitasi dan evaluasi peran masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular.
- i. Fasilitasi dan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.

- j. Fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- k. Fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan sistem aplikasi pendataan dan pendayagunaan Data Profil Kelurahan
- l. Pembinaan balai pelatihan masyarakat.
- m. Pembinaan dan pengembangan produksi dan pemasaran
- n. pengembangan dan perluasan pembangunan sarana jalan desa dan sarana lainnya dengan sistem padat karya
- o. pengkajian dan pembentukan Wartekdes tingkat kelurahan
- p. Pemantapan hasil pelatihan /pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat
- q. Meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- r. Pengembangan keberdayaan keluarga miskin melalui peningkatan pendapatan keluarga miskin dengan melakukan diversifikasi usaha keluarga / masyarakat.
- s. Pemutakhiran data usaha ekonomi masyarakat yang meliputi potensi sumberdaya manusia dan usaha
- t. Pengembangan lembaga keuangan mikro di kelurahan
- u. pemutakhiran data keluarga sangat miskin, miskin dan hampir miskin
- v. Pengembangan usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP)
- w. Pengembangan kewirausahaan kelompok-kelompok usaha masyarakat
- x.. Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam usaha mikro dan kecil
- y. Peningkatan Badan Usaha Milik desa (BUMDes)
- z. Peningkatan sarana dan prasarana pasar desa / kelurahan

25. BADAN KETAHANAN PANGAN

- a. Terselenggaranya sistem distribusi dan ketersediaan bahan pangan yang aman untuk masyarakat sesuai dengan standar Pola pangan harapan (PPH)
- b. Tersedianya bahan konsumsi pangan yang bergizi, beragam dan berimbang sesuai dengan harapan hidup
- c. Tersedianya penyuluh dan petani yang profesional
- d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan teknologi

26. KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;
- e. Program Pengelolaan Arsip Daerah;
- f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi / Data dan Dokumentasi;
- g. Program Pengelolaan Arsip Daerah, Untuk Pengamanan Dokumen 33 SKPD dan Pelatihan Arsiparis;

27. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

- a. Pengembangan teknologi informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- b. Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- c. Peningkatan sarana dan prasarana kantor
- d. Penyempurnaan ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perizinan usaha

4). RPJM ke-4 (2023 – 2027)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan Kota Palangka Raya yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan *menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing*.

Bersamaan dengan itu, terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan iptek;

meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2028 mencapai kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota lain di Indonesia yang berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan mandiri dan berkeadilan makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi, pos dan telematika yang memadai bagi seluruh masyarakat yang menjangkau sampai seluruh desa di Kota Palangka Raya; tercapainya elektrifikasi dan air bersih perdesaan dan untuk rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat secara memadai.

Secara umum program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan menjadi tahapan dan skala prioritas agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah tahap ke-4 tahun 2024-2028 adalah :

1. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- a. Terlaksananya sistem penilaian kerja SDM Aparatur
- b. Meningkatkan kesejahteraan SDM Aparatur melalui upaya penyempurnaan sistem numerasi yang mengakomodasikan PNS untuk hidup layak.
- c. Tampilan citra kualitas dan produk pegawai sebagai aparatur negara dengan wajah birokrasi yang efektif, citra pemerintahan yang kuat dan

bersih dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima dan profesional.

2. DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- a. Tergalinya sumber keuangan daerah melalui pajak dan retribusi daerah dengan jalan intensifikasi maupun diversifikasi.
- b. Terlaksananya pengendalian penerimaan dan pengeluaran keuangan maupun belanja daerah yang lebih efisien dan efektif.
- c. Pengadministrasian dan pengendalian terhadap aset daerah secara optimal dan transparan.
- d. Terlaksananya sistem, dan pola manajemen terbuka dalam pelayanan.

3. BAPPEDA

- a. Mantapnya koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Terwujudnya basis data perencanaan dan online;
- c. Pemantapan dan penguatan penelitian dan pengembangan;
- d. Adopsi dan penerapan inovasi industri dan teknologi;
- e. Mantapnya Tim Koordinasi Tata Ruang Daerah;
- f. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah berbasis kinerja;
- g. Peningkatan penanaman modal dalam negeri dan asing

4. INSPEKTORAT KOTA

- a. Melanjutkan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut
- b. Mantapnya keterampilan dan keahlian aparatur dalam pelaksanaan tugas pengawasan
- c. Menugaskan secara penuh pejabat fungsional melaksanakan tugas pengawasan
- d. Melanjutkan dan meningkatkan pelayanan publik berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat dengan waktu tertentu.
- e. Melanjutkan pelaksanaan review atas laporan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya
- f. Melanjutkan evaluasi LAKIP bagi Pemerintah Kota Palangka Raya
- g. Melanjutkan rekrutmen SDM pengawasan berbasis akuntansi dan disiplin lain yang relevan

- h. Melaksanakan gelar pengawasan tingkat Kota Palangka Raya
- i. Melanjutkan peningkatan kerjasama baik antar sesama (Aparat pengawasan intern pemerintah) maupun dengan Aparat Pengawasan Eksternal (BPK)
- j. Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dengan tertibnya administrasi keuangan setiap SKPD.
- k. Tercapainya sarana dan prasarana penunjang

5. KESBANGLINMAS

- a. Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat di Kota Palangka Raya yang kondusif dalam berbangsa dan bernegara
- b. Meningkatnya rasa cinta tanah air
- c. Kelembagaan organisasi masyarakat berfungsi sudah sesuai dengan fungsinya.

6. SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA

- a. Mantapnya kualitas pelayanan tertib administrasi dan keuangan;
- b. Meningkatkan Kualitas Pengembangan SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya;
- c. Kinerja Anggota Dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan membantu proses penyelesaian;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana dan pekerjaan administrasi dengan tenaga-tenaga profesional

7. DINAS PERTANIAN

- a. Tercapainya produksi dan ketersediaan pangan, pengembangan diversifikasi produk dan konsumsi pangan, pemantapan distribusi produk (perwilayahan komoditas unggulan).
- b. Terpenuhinya infrastruktur pertanian.
- c. Tercapainya penerapan teknologi spesifik lokal.
- d. Pengembangan agroindustri pedesaan di kelurahan
- e. Pengembangan mekanisme produksi pertanian primer
- f. Tercapainya pengembangan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah

- g. Tercapainya penerapan good farming practices dan good handling practices

8. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- a. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IpTek), sumberdaya manusia yang profesional dan sarana/prasarana
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung, produksi dan jasa lingkungan untuk mencapai keseimbangan ekologi, sosial, budaya dan ekonomi yang lestari.
- c. Tercapai nilai tambah produksi dan hutan yang lestari
- d. Terjaminnya distribusi manfaat hasil hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan

9. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- a. Pengembangan teknologi pertambangan yang tepat guna dan berdaya guna
- b. Terdatanya data potensi tambang
- c. Tersedianya energi alternatif berupa biogas, PLTS dan Biosel
- d. Pengembangan jaringan listrik dan daya listrik
- e. Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur
- f. Tersedianya pengawasan dan penertiban usaha pertambangan dan energi
- g. Sarana dan prasarana yang tersedia
- h. Penanggulangan kerusakan lingkungan kawasan tambang
- i. Melakukan pengembangan dan penelitian

10. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

- a. Tercapainya sistem pendukung usaha Koperasi dan UMKM
- b. Tercapainya Koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah dan sebagai mitra badan usaha lainnya.
- c. Tercapainya produksi industri pengolahan komoditi unggulan daerah.
- d. Tercapainya teknologi proses dan peralatan yang food grade, maju dan efisien.

- e. Mengembangkan sentra produk kerajinan dan barang seni sebagai daerah tujuan wisata serta pasiolitasi pendirian pasar seni dan kerajinan
- f. Mengembangkan dan meningkatkan pasar domestik dan internasional.
- g. Penggunaan teknologi modern yang ramah lingkungan.
- h. Mengembangkan mutu hasil industri sesuai dengan standart internasional.
- i. Pelayanan prima di bidang perdagangan
- j. Tersedia informasi baik lokal, regional dan global secara berkesinambungan terhadap dunia usaha
- k. Meningkatkan pengembangan produk unggulan daerah, preferensi terhadap pengusaha pengguna produksi dalam negeri / daerah dan promosi.
- l. Peningkatan efifiensi perdagangan dalam negeri.
- m. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan
- n. Meningkatnya kerjasama perdagangan Internasional
- o. Meningkatnya dan pengembangan ekspor
- p. Tercapainya perlindungan konsumen.
- q. Meningkatnya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
- r. Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha

11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- a. Terwujudnya sumberdaya manusia yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar
- b. Terciptanya standarisasi upah sesuai dengan kebutuhan hidup
- c. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
- d. Penerapan transmigrasi yang produktif.
- e. Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban tenaga kerja

12. DINAS KESEHATAN

Sasaran : Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mantap

- j. Penyelenggaraan upaya kesehatan (UKP+UKM) tetap memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan (bayi, anak, ibu, usila, masyarakat pekerja sektor informal, dan masyarakat miskin)

- k. Pelayanan kesehatan yang bermutu di puskesmas dan jaringannya telah sesuai dengan harapan masyarakat.
- l. Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular telah dapat dilaksanakan dengan mantap dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Pelayanan geriatric telah berkembang dan berjalan dengan efektif. Perbaikan gizi masyarakat telah optimal dan berkesinambungan. Pembangunan berwawasan kesehatan telah dapat dilaksanakan sepenuhnya (ketersediaan air minum, sarana sanitasi dasar, dan pengawasan kualitas lingkungan)
- m. Pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah telah mencapai besaran ideal proportional terhadap anggaran pembangunan pemerintah, berkesinambungan, dan dengan nilai per-capita yang memadai
- n. Pembelanjaan kesehatan bersumber pemerintah, swasta, dan masyarakat, telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan yang terkendali dan berkesinambungan
- o. Pemenuhan SDMK yang berkualitas dapat terpenuhi, didukung dengan mantapnya unsur manajemen kesehatan (administrasi kesehatan, sistem informasi kesehatan, hukum kesehatan, dan litbangkes)
- p. Kemandirian Masyarakat telah memberikan kontribusi yang bermakna terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan

13. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- a. Tercapainya kuantitas dan kualitas prasarana/sarana pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan yang sesuai dengan pasar kerja
- b. Tercapainya kualitas pendidikan Pendidik dan tenaga kependidikan ke jenjang S2 dan S3
- c. Terwujudnya ratio pendidikan umum dan kejuruan (SMA : SMK = 30 : 70)
- d. Peningkatan kuantitas lembaga pendidikan untuk memperoleh pengakuan Standar Mutu Manajemen ISO 9001 : 2000
- e. Meningkatnya prestasi olah raga Kota Palangka Raya pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional

- f. Tersedianya dana pemerintah di bidang pemuda dan olah raga
- g. Meningkatnya partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olah raga Kota Palangka Raya

14. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Target kunjungan wisatawan 1.000.000 orang dengan program :

- a. Promosi pariwisata secara intensif termasuk dukungan terhadap MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*)
- b. Memelihara destinasi unggulan disertai pengembangan atraksi wisata
- c. Pengembangan kemitraan antar daerah dan antar stke holder
- d. Pengembangan dan Pementasan kegiatan kebudayaan dan kesenian berskala regional/nasional
- e. Pembinaan usaha bidang pariwisata

15. DINAS PEKERJAAN UMUM

- a. Meningkatkan kemampuan pelayanan seluruh jaringan jalan di Kota Palangka Raya menjadi kondisi baik dan mantap melalui program peningkatan jalan, pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan rutin jalan.
- b. Pembangunan jaringan jalan pada kawasan pertumbuhan
- c. Menyelesaikan Pembangunan Sistem Jaringan Drainase Perkotaan, sesuai dengan master plan yang sudah tersedia
- f. Menyelesaikan Program Penyediaan Air Bersih Perdesaan seluruh Kota Palangka Raya
- g. Pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada.
- h. Pengembangan dan pemeliharaan saluran irigasi.

16. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Perluasan daerah wisata pelabuhan rambang dan Kereng Bangkirai dan daerah lainnya
- b. Tercapainya jaringan komunikasi
- c. Terpenuhinya rambu sungai
- d. Menyiapkan penyusunan interforum program pelayanan angkutan umum/masal dengan melakukan evaluasi terhadap kapasitas dan frekuensi yang tersedia dan mengembangkan sistem angkutan umum/masal yang terpadu dan efisien.

- e. Menyusun strategi tahapan-tahapan pengembangan sistem angkutan umum/masal perkotaan dalam bentuk sub-sub sistem teknologi angkutan yang dapat ditingkatkan kapasitasnya sesuai pertumbuhan permintaan jasa angkutan umum/masal di wilayah kota dan pinggiran.
- f. Melakukan tinjau ulang dan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan pendukung operasional dan perizinan bagi penyelenggaraan angkutan umum/masal di wilayah kota.
- g. Tercapainya jaringan angkutan di seluruh Kota Palangka Raya

17. DINAS TATA KOTA, BANGUNAN DAN PERTAMANAN

- a. Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palangka Raya
- b. Tercapainya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada kawasan pusat kota, kawasan cepat tumbuh dan kawasan khusus lainnya serta penyiapan peraturan daerah pendukungnya
- c. Peningkatan pelayanan informasi tata ruang melalui penyediaan peta dan database tata ruang, prasarana dan utilitas perkotaan
- d. Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan rencana tata ruang melalui pengaturan insentif/disinsentif serta optimalisasi perjanjian
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan penataan bangunan, reklame dan tempat usaha serta peraturan pendukungnya
- f. Peningkatan pengawasan dan pnerapan *law enforcement* pemanfaatan ruang secara efektif
- g. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan
- h. Melanjutkan pengembangan sarana dan prasaran tempat pemakaman umum yang memadai dan terpelihara
- i. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pengembangan kapasitas SDM petugas pemadam kebakaran Kota Palangka Raya
- j. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran melalui pembinaan pemadam kebakaran swakarsa Kota Palangka Raya

- k. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau kota melalui pembangunan efektivitas pemeliharaan taman-taman kota, hutan kota serta ruang terbuka hijau kota lainnya
- l. Optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan taman-taman kota melalui penyediaan lokasi pembibitan (nursery) dan pengolahan pupuk (termasuk pupuk organik)
- m. Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan (PJU dan utilitas perkotaan) yang sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan masyarakat melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan PJU dan utilitas perkotaan
- n. Mendorong keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan utilitas perkotaan

18. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Kapasitas kelembagaan dan SDM
- b. Tertata lingkungan yang sehat
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH (komunikasi, informasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat).
- d. Peningkatan kapasitas dan mekanisme dalam pemahaman lingkungan hidup.
- e. Perencanaan lingkungan dan penataan ruang.
- f. Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- g. Perlindungan dan konservasi SDA.
- h. Pengelolaan ruang evakuasi bencana LH
- i. Pengelolaan ruang terbuka hijau. (Kantor/Sekolah Peduli Lingkungan 85%)
- j. Pengembangan kinerja pengelolaan limbah dan persampahan
- k. Peningkatan kapasitas kinerja dan pengendalian polusi. (Pengujian Emisi/polusi udara 85%)
- l. Peningkatan kapasitas dan peningkatan pencemaran air. (Pengujian limbah pembuangan air 80%)
- m. Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
- n. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- o. Pengendalian dampak perubahan iklim LH

- p. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. (70%)
- q. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

19. DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN

- a. Terwujudnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berhasil guna
- b. Terwujudnya sarana dan prasarana pasar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kota
- c. Terwujudnya Instalasi Pengelolaan Limbah (IPL) yang ramah lingkungan

20. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tertib administrasi kependudukan dengan layanan prima berbasis SIAK dengan data penduduk yang akurat dan berkualitas

21. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- a. Pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban.
- b. Sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- c. Terjaganya aset daerah dan pejabat daerah
- d. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan anggota satpol PP.
- e. Pengembangan / Peningkatan kualitas Sumber Daya anggota Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui studi banding, pelatihan, diklat dan lain-lain.
- f. Pembinaan, pengelolaan dan pengawasan pedagang kaki lima.
- g. Tersedianya lokasi pasar yang representatif.
- h. Terciptanya suasana berbelanja yang aman dan nyaman.
- i. Meningkatnya penanganan pelayanan pengaduan masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban umum

22. DINAS SOSIAL

- a. Tercapainya cakupan dan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial fakir miskin, lanjut usia terlantar, anak dan balita terlantar, penyandang cacat, tuna sosial, korban tindak kekerasan dan eks trauma, orang terlantar.
- b. Pemantapan peran dan fungsi LKB sebagai :

- 1). Pusat pengembangan mutu hasil pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial
 - 2). Pusat sistem informasi usaha kesejahteraan sosial
 - 3). Pusat jaringan kemitraan potensi dan sumber kesejahteraan sosial masyarakat (karang taruna, PSM/TKSM kelompok-kelompok swadaya masyarakat, organisasi/lembaga/ yayasan kesejahteraan sosial) serta dunia usaha dalam usaha kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pelayanan korban bencana
 - d. Tercapainya kualitas SDM aparatur yang profesional dan handal
 - e. Pemantapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial
 - f. Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan setiap umat beragama.
 - g. Peningkatan kerukunan inter, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.

23. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

- a. Terwujudnya kualitas melalui aksi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial politik dan hukum
- b. Terwujudnya upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya.
- c. Terbinanya kebijakan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan anak terutama di bidang pendidikan, kesehatan sosial, hukum dan ketenagakerjaan.
- d. Terwujudnya kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) dan perlindungan anak di kota Palangka Raya
- e. Terwujudnya perencanaan, pemantauan evaluasi PUG dan PUA di Kota Palangka Raya.
- f. Terwujudnya pengembangan program KRR bagi anak putus sekolah
- g. Terwujudnya program PIK dan konseling KRR di sekolah
- h. Terwujudnya pelayanan kegagalan ber KB
- i. Terwujudnya pertemuan teknis medis pengelola KRR tingkat Kota

- j. Terwujudnya sosialisasi program KRR tingkat Kota
- k. Terwujudnya lomba PIK KRR se kota Palangka Raya
- l. Terwujudnya monitoring dan evaluasi KRR se Kota Palangka Raya
- m. Terwujudnya monitoring dan evaluasi program KB
- n. Terwujudnya keluarga kecil sejahtera
- o. Terwujudnya kesejahteraan kelompok UPPKS
- p. Tergugahnya minat dan semangat masyarakat dalam bidang ekonomi produktif
- q. Terwujudnya secara kualitas dan kuantitas kelompok kader IMP, BKB, BKR dan BKL
- r. Terwujudnya kualitas dan kuantitas pengelola pelaksana dan kader dalam penyelenggaraan tumbuh kembang Balita
- s. Terwujudnya data keluarga.

24. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA

- a. Pemantapan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur pemerintahan kelurahan
- b. Pemantapan sumberdaya aparatur pemerintahan kelurahan
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2W-KSS (Program Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga Sehat dan Sejahtera).
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan POSYANDU serta uji coba Sistem Informasi Posyandu (SIP).
- e. Terwujudnya fasilitasi peran nilai-nilai budaya dan lembaga adat serta sosial budaya masyarakat.
- f. Fasilitasi dan evaluasi pembangunan partisipatif
- g. Fasilitasi dan evaluasi pembinaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
- h. Fasilitasi dan evaluasi peran masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular.
- i. Fasilitasi dan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.
- j. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- k. Fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan sistem aplikasi pendataan dan pendayagunaan Data Profil Kelurahan
- l. Sertifikasi nasional Balai Pelatihan Masyarakat
- m. Pengembangan dan perluasan pemanfaatan lahan tidur, produksi dan pemasaran

- n. Pembinaan dan pemanfaatan Wartekdes dalam rangka penguatan Posyantekdes sebagai sarana efisiensi pembangunan
- o. Terwujudnya Perluasan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- p. Terwujudnya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- q. Terwujudnya Keberdayaan keluarga miskin melalui peningkatan pendapatan keluarga miskin dengan melakukan diversifikasi usaha keluarga / masyarakat.
- r. Pemutakhiran data usaha ekonomi masyarakat yang meliputi potensi sumberdaya manusia dan usaha
- s. Terwujudnya lembaga keuangan mikro menjadi koperasi simpan pinjam kelurahan
- t. Pemutakhiran data keluarga sangat miskin, miskin dan hampir miskin
- u. Terwujudnya usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) untuk mendukung BUMDes/kelurahan
- w. Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam usaha mikro dan kecil dalam pemasaran produk
- x. Terwujudnya dan diversifikasi usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- z. Terwujudnya pasar desa/kelurahan

25. BADAN KETAHANAN PANGAN

- a. Tercapainya ketersediaan bahan pangan yang baik aman baik nabati maupun rohani
- b. Terciptanya pola konsumsi pangan masyarakat yang selalu bernilai gizi, beragam dan berimbang sesuai dengan harapan hidup
- c. Meningkatnya sumberdaya penyuluh dan petani yang profesional sesuai dengan potensi yang ada
- d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dengan kemajuan teknologi

26. KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI

- a. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;
- e. Terlaksananya Pengelolaan Arsip Daerah;

- f. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi / Data dan Dokumentasi;
- g. Terlaksananya Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka;

27. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

- a. Terwujudnya semua perijinan melalui teknologi informasi
- b. Pemantauan, pengendalian ijin melalui SMS bagi wajib pajak yang ijinnya sudah berakhir
- c. Terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur di bidang pelayanan

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

RPJP Kota Palangka Raya adalah kerangka acuan bagi Pemerintah Daerah dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dan terarah untuk menjalankan program pembangunan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan kaidah pelaksanaan yaitu :

- a. Pemerintah Kota Palangka Raya berkewajiban untuk melakukan sosialisasi visi, misi dan arah pembangunan Kota Palangka Raya kepada semua lapisan masyarakat agar diketahui, dipahami, diinternalisasi selanjutnya dieksternalisasi sehingga sadar fungsi dan tugas masing-masing.
- b. Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah memiliki kewajiban dalam mengejawantahkan visi, misi dan arah pembangunan RPJP ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang akan dijadikan sebagai pedoman dan panduan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra).
- c. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palangka Raya harus menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah dalam menyusun rencana strategis.
- d. Legislatif dan jajaran Eksekutif, serta seluruh elemen masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin konsistensi antara RPJPD, RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra SKPD dan rencana Kerja SKPD Kota Palangka Raya.

Dalam RPJPD ini yang memuat visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya, terkandung semangat untuk mengaktualisasikan Moto Kota Palangka Raya yaitu: **KOTA CANTIK** yang intinya tekad dari seluruh komponen masyarakat Kota Palangka Raya untuk menyatukan langkah, sumberdaya dan karya serta karsa dalam mewujudkan masyarakat Palangka Raya yang berpendidikan, maju terampil dan sejahtera. Semangat dan tekad Kota Palangka Raya sesuai dengan visi dan misi yang disepakati, akan berhasil apabila didukung oleh:

- Komitmen dari kepemimpinan pemerintahan daerah dan seluruh aparatur dalam jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Konsistensi kebijakan.
- Keberpihakan kepada rakyat.
- Peran serta masyarakat dan peran aktif dunia usaha.